

# MODUL III BUKU KERJA PELATIHAN APLIKASI SISWASKEUDES

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP

## **MODUL BUKU KERJA PELATIHAN**

# APLIKASI SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DESA (SISWASKEUDES)

## KATA PENGANTAR — Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya modul terkait Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif. Oleh karena itu, dalam rangka menghasilkan keyakinan terhadap hal tersebut, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Saat ini terdapat 74.957 desa di Indonesia yang merupakan lokus program pengawasan Keuangan Desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, maka dibangun sistem pengawasan berbasis elektronik yaitu melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkolaborasi dan bersinergi menyusun 3 (tiga) jenis modul. Modul pertama berjudul "Regulasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa", yang berisikan tentang: konsep, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Modul kedua berjudul "Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Aset Desa", yang berisikan tentang: konsep pengawasan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi, framework, langkah kerja pengawasan dengan aplikasi Siswaskeudes. Modul yang ketiga berjudul "Buku Kerja Pelatihan Aplikasi Siswaskeudes', yang berisikan: konsep, teknik, serta contoh tentang audit kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kita tentu berharap, modul ini dapat menjadi rujukan pembelajaran dan dapat memberikan nilai tambah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengawasan desa yang baik (good village governance).

Jakarta, 23 Maret 2021

REPUBLIK INDC

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

aposan simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE

## KATA PENGANTAR – Deputi Kepala BPKP **Bidang PPKD**

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, APIP Kabupaten/Kota diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Namun, mengingat jumlah desa yang begitu banyak, APIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan perannya secara optimal karena terbatasnya sumber daya. Untuk itu, BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri berinisiatif untuk membangun tools pengawasan berbasis elektronik yang bernama Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi tersebut dikembangkan dalam rangka membantu APIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan/audit dengan berbasis risiko pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan pengawasan, pemilihan sampel, pelaksanaan uji substantif sampai dengan pelaporan hasil pengawasan.

Implementasi pengawasan berbasis elektronik tersebut memerlukan seperangkat pemahaman dan keterampilan khusus agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Untuk itu, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri menyusun tiga modul yang akan digunakan untuk mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis konsep-konsep pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes. Ketiga modul tersebut adalah modul Regulasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Modul Konseptual Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dan Modul Buku Kerja Pengeoperasian Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terwujudnya modul ini.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawa Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan

est Dadang Kurala, Ak, MBA,CA,CGAP,QIA, CfrA,

ASEAN CPA, CGCAE

P. COLISTIK INDO!

### DAFTAR ISI

		Hala	man
Kata Pen	gantar - Inspek	tur Jenderal Kementerian Dalam Negeri	i
Kata Pen	gantar - Deputi	Kepala BPKP Bidang PPKD	ii
Daftar Is	i		iii
Daftar Ta	abel		iv
Pendahu	luan		V
Bab I	Petunjuk Umu	m Penggunaan Aplikasi Siswaskeudes	1
	Pelatihan 1.1	Menyediakan (restore) database	3
	Pelatihan 1.2	Koneksi Database	4
	Pelatihan 1.3	Login Aplikasi	4
Bab II	Pelatihan Pere	ncanaan Pengawasan	5
	Pelatihan 2.1	Pengaturan Parameter	5
	Pelatihan 2.2	Pengolahan Informasi Aspek Keuangan dan Aspek Nonkeuangan	13
	Pelatihan 2.3	Pemilihan Desa Sampel Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Tugas	29
Bab III	Pelatihan Surv	rei Pendahuluan dan Uji SPI	34
	Pelatihan 3.1	Survei Pendahuluan	34
	Pelatihan 3.2	Pengujian SPI	39
Bab IV	Pelatihan Uji S	Substantif	46
	Pelatihan 4.1	Pengujian Substantif atas Proses Perencanaan	46
	Pelatihan 4.2	Pengujian Substantif atas Penatausahaan Pendapatan Desa	52
	Pelatihan 4.3	Pengujian Substantif atas Penatausahaan Belanja	57
	Pelatihan 4.4	Pengujian Substantif atas Pengeluaran Pembiayaan	65
	Pelatihan 4.5	Pengujian Substantif atas Pengadaan Barang dan Jasa Desa	68
	Pelatihan 4.6	Pengujian Substantif atas Kewajiban Perpajakan	75
	Pelatihan 4.7	Pengujian Substantif atas Pengelolaan Aset Desa	82
	Pelatihan 4.8	Pengujian Substantif atas Pemanfaatan Hasil Kegiatan	86
Bab V	Pelaporan Has	il Pemeriksaan	89
Tim Peny	usun Modul		91

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Desa dan Penetapan RKP Desa	6
Tabel 2.2	Aspek Nonkeuangan	9
Tabel 2.3	Contoh Penentuan Kriteria SDM	10
Tabel 2.4	Contoh Penentuan Kriteria Geografis	10
Tabel 2.5	Contoh Penentuan Kriteria Pembinaan	11
Tabel 2.6	Contoh Penentuan Kriteria Pengawasan	11
Tabel 2.7	Contoh Penentuan Kriteria Nonkeuangan Lainnya	12
Tabel 2.8	Faktor yang Mempengaruhi Skor Risiko Aspek Keuangan	13
Tabel 2.9	Faktor-faktor Nonkeuangan sebagai Dasar Pemberian Skor Risiko	16
Tabel 2.10	Data Pendidikan Perangkat Desa	19
Tabel 2.11	Data Geografis Desa	21
Tabel 2.12	Data Frekuensi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	23
Tabel 2.13	Data Frekuensi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	25
Tabel 2.14	Data Aspek Lainnya	27
Tabel 2.15	Data Pegawai Tersedia untuk Penugasan	31
Tabel 2.16	Pembagian Wilayah Desa per Tim	32
Tabel 2.17	Tim Penugasan	33
Tabel 3.1	Pertanyaan pada Unsur Lingkungan Pengendalian	40
Tabel 3.2	Pertanyaan pada Unsur Penilaian Risiko	41
Tabel 3.3	Pertanyaan pada Unsur Kegiatan Pengendalian	42
Tabel 3.4	Pertanyaan pada Unsur Penilaian Risiko	44
Tabel 3.5	Pertanyaan pada Unsur Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	45
Tabel 4.1	Pertanyaan terkait Proses Penyusunan RKPDesa	47
Tabel 4.2	Pertanyaan terkait Proses Penyusunan APBDesa	49
Tabel 4.3	Data Hasil Verifikasi Data Penerimaan	53
Tabel 4.4	Analisis Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan	56
Tabel 4.5	Data Kuitansi untuk Uji Petik	58
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Atas Belanja tidak menggunakan SPP	60
Tabel 4.7	Data Kegiatan PBJ untuk Uji Petik	68
Tabel 4.8	Data Sampel Transaksi untuk Pengujian PPN	76
Tabel 4.9	Data Rincian Pemotongan dan Penyetoran PPN	77
Tabel 4.10	Data Sampel Transaksi untuk Pengujian PPh Pasal 22	78
Tabel 4.11	Data Rincian Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22	79
Tabel 4.12	Daftar Penambahan Aset Desa TA 2019 pada Desa Cijulang	83
Tabel 4.13	Hasil Inventarisasi Aset Desa oleh Auditor	85
Tahol 4 14	Data Sampel Kegiatan untuk Hii Petik Pemanfaatannya	87

#### A. LATAR BELAKANG

UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan desa, Bupati/Walikota wajib melakukan pembinaan pengawasan melalui APIP Daerah (Permendagri Nomor 73 Tahun 2020), ketentuan pembinaan keuangan desa oleh Bupati/Walikota diwakili oleh APIP Daerah. Namun karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh APIP Daerah baik kualitas maupun jumlah selaku pengemban fungsi pengawasan terhadap tata kelola diperlukan alat bantu yang diharapkan dapat memudahkan APIP Daerah menjalankan kegiatan pengawasannya. BPKP bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah membangun Aplikasi Siswaskeudes yaitu sebuah alat bantu pengawasan berbasis elektronik yang dapat membantu APIP daerah dalam menjalankan perannya mulai dari perencanaan pengawasan sampai penerbitan laporan hasil pengawasan.

Penggunaan aplikasi tersebut tentunya memerlukan pemahaman dan keterampilan. Modul ini disusun dalam rangka untuk membekali APIP sehingga mampu untuk mengoperasikan Aplikasi Siswaskeudes dalam aktivitas pengawasannya.

#### **B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah melaksanakan penugasan pengawasan pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes.

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diklat diharapkan mampu:

- 1. Menjelaskan konsep, prinsip dasar, dan gambaran umum Aplikasi Siswaskeudes;
- 2. Melaksanakan perencanaan penugasan Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi Siswaskeudes;
- 3. Melaksanakan tahapan pelaksanaan pengawasan mulai dari survei pendahuluan sampai dengan uji substansi dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes; dan

4. Menatausahakan kertas kerja pengawasan dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes.

#### C. URAIAN SINGKAT ISI MODUL

Modul ini membekali peserta dengan materi berupa konsep, teknik, serta contoh tentang Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri atas pokok-pokok bahasan sebagai berikut.

Bab I Petunjuk Umum Penggunaan Aplikasi Siswaskeudes

Bab ini membahas konsepsi Aplikasi Siswaskeudes serta penjelasan teknis mengenai proses instalasi.

Bab II Pelatihan Perencanaan Pengawasan

Bab ini membahas pengaturan parameter yang akan digunakan sebagai referensi data semua aktivitas pengoperasian Aplikasi Siswaskeudes dan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko mulai dari penetapan obyek pengawasan sampai dengan penerbitan surat tugas.

Bab III Pelatihan Survei Pendahuluan dan Uji SPI

Bab ini membahas bagaimana melakukan kegiatan prapengawasan mulai dari survei pendahuluan sampai dengan pengujian SPI atas obyek pengawasan sebagai dasar dilakukannya uji substantif.

Bab IV Pelatihan Uji Substantif

Bab ini membahas mengenai proses pengujian substantif atas beberapa aspek keuangan berdasarkan kertas kerja yang telah disediakan pada Aplikasi Siswaskeudes.

Bab V Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa

Bab ini membahas mengenai pelaporan pemeriksaan kinerja berdasarkan data yang diinputkan pada tahap sebelumnya

#### D. METODE PEMBELAJARAN

Agar peserta mampu memahami konsep pengawasan dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes beserta implementasinya, proses belajar mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode ini, peserta didorong untuk berperan aktif melalui komunikasi dua arah. Metode pembelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi/latihan pemecahan kasus. Instruktur akan membantu peserta dalam memahami materi dengan metode ceramah dan pembahasan contoh kasus. Dalam proses ini peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi materi pelajaran. Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan lebih baik, dilakukan diskusi kelompok sehingga peserta benar-benar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Modul ini berisi kasus-kasus dan pertanyaan untuk diskusi dalam rangka membantu peserta untuk memahami materi diklat.

#### BAB I

## PETUNJUK UMUM PENGGUNAAN APLIKASI SISWASKEUDES

#### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mendapat gambaran umum mengenai aplikasi serta dapat memahami proses instalasi Aplikasi Siswaskeudes.

#### **GAMBARAN UMUM APLIKASI**

Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) merupakan alat bantu bagi APIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siswaskeudes dikembangkan secara bersamasama antara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pengembangan aplikasi ini mengacu pada Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Aplikasi Siswaskeudes meliputi 2 proses bisnis utama, yaitu *Integrated reviews* dan Pemeriksaan rinci. Integrated reviews bertujuan untuk menentukan fokus dan sasaran pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan skala prioritas. Pemeriksaan rinci berisi langkah-langkah pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa.

Menu pada aplikasi ini secara umum terdiri dari Parameter, Integrated Reviews, Pemeriksaan Rinci dan Pelaporan.

#### 1. Parameter

Menu ini fungsinya untuk menyediakan data parameter yang nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam melakukan semua aktivitas pada aplikasi.

#### 2. *Integrated Reviews*

Menu ini merupakan wadah utama pemeriksaan berbasis faktor risiko (risk-factor based-audit) yang ditandai dengan banyaknya porsi melakukan analisis data. Integrated Reviews atas laporan keuangan desa dapat diterapkan pada database Siskeudes yang telah terkompilasi di tingkat Pemerintah Daerah. Data yang telah terkumpul dimanfaatkan oleh auditor sebagai salah satu bahan sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke desa.

#### 3. Pemeriksaan Rinci

Tujuan dilakukannya Pemeriksaan rinci atas laporan keuangan pemerintah desa adalah untuk menilai bahwa pemerintah desa telah menjalankan kegiatannya secara efisien, efektif dan ekonomis; mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).

#### 4. Pelaporan

Menu ini untuk menampilkan laporan atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdiri dari:

- a. Rekapitulasi Kesimpulan Kertas Kerja
- b. Rekapitulasi Temuan
- c. Rekapitulasi Permasalahan Lainnya
- d. Draf Pelaporan Hasil Pemeriksaan

#### **SYSTEM REQUIREMENT APLIKASI**

Aplikasi Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Siswaskeudes) ini menggunakan database Microsoft SQL server. Ukuran database ini relatif besar karena berbasis database Aplikasi Siskeudes yang berisi Anggaran dan Realisasi APBDesa se-Kabupaten/Kota.

Syarat utama agar Aplikasi Siswakeudes berjalan adalah kabupaten/kota serta desadesa di wilayahnya sudah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siswaskeudes dapat berjalan secara optimal diperlukan syarat-syarat teknis bagi pengguna aplikasi yaitu:

- Komputer sudah terinstal Microsoft SQL server;
- 2. Telah tersedia Database Aplikasi Siskeudes kompilasi tingkat kabupaten/kota.

File Instalasi Aplikasi Siswaskeudes terdiri dari 3 file utama yaitu:

- 1. File Aplikasi Siswaskeudes;
- 2. Database Aplikasi Siswaskeudes;
- Database Siskeudes Kompilasi Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **USER APLIKASI**

Pengguna aplikasi adalah APIP Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan di lapangan, semua personil dari tim penugasan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dapat mengakses Aplikasi Siswaskeudes sesuai dengan perannya masing-masing.

# PELATIHAN 1.1 MENYEDIAKAN (RESTORE) DATABASE

#### I. Proses Instalasi

Proses *restore* database adalah tahap awal sebelum database yang berbasis SQL Server bisa dikoneksikan dengan aplikasi. Implementasi Aplikasi Siswaskeudes membutuhkan informasi dukungan dari database Siskeudes, maka proses *restore* database dilakukan atas dua database yaitu database kosong Aplikasi Siswaskeudes dan database kompilasi Aplikasi Siskeudes.

Langkah-langkah restore database berurutan sebagai berikut:

- Buka Enterprise Manager
   Klik Microsoft SQL server–Klik (local) (Windows NT);
- 2. Klik kanan Database -> Pilih All Task -> Restore Database -> masukkan nama database pada kolom *Restore as Database;*
- Restore Database -> General -> Pilih From Device -> Select device -> Add ->
  Choose Restore Destination;
- Pilih Options -> Backup number -> Parameter Devices -> Select Devices Restore backup set -> Ok -> Restore database file as -> Pilih Siskeudes V2\_data -> Restore Progress;
- 5. Selesai.

#### **PELATIHAN 1.2**

#### **KONEKSI DATABASE**

Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Koneksi database disimpan dalam file *config.ini* pada folder Aplikasi Siswaskeudes. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi Microsoft SQL server Database. Langkah-langkah koneksi database sebagai berikut:

- Muncul tampilan setting koneksi database -> Datakoneksi SQL server -> Server
   Name -> SQL Server -> Nama Login -> Ketik sa -> Test Koneksi;
- 2. Pilih database -> Siskeudes (contoh : desasimulasi)-> Siswaskeudes (dbsiswas);
- 3. Selesai.

#### PELATIHAN 1.3 LOGIN APLIKASI

#### II. Pengoperasian Aplikasi

Setelah proses instalasi selesai, maka user aplikasi siap mengoperasikan aplikasi Siswaskeudes. Langkah-langkah proses login sebagai berikut:

- Buka icon Aplikasi Siswaskeudes
   Langkah pertama cari Folder Aplikasi Siswaskeudes -> Klik File Aplikasi Siswaskeudes.
- Masukkan user dan password Aplikasi
   Sebelum masuk ke dalam Aplikasi, lakukan penginputan nama user dan password. Kemudian ketikkan tahun pemeriksaan seperti contoh default 2020 dan diakhiri dengan enter Login atau Cancel.
- 3. Selesai.

#### **BAB II**

#### PELATIHAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN

#### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami proses pemilihan obyek pemeriksaan yang berbasis risiko atas aspek keuangan dan nonkeuangan.

#### **Gambaran Umum**

Kabupaten Simulasi merupakan kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 31 desa. Kabupaten tersebut sudah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa mulai tahun 2019. Pada tahun 2021 kepala daerah menugaskan Inspektorat Kabupaten Simulasi untuk melakukan pemeriksaan kinerja tahun anggaran 2020 terhadap desa-desa yang berada di Kabupaten Simulasi.

Dikarenakan terbatasnya jumlah APIP pada Inspektorat Kabupaten Simulasi sedangkan jumlah desa yang ada di Kabupaten Simulasi sangat banyak maka Inspektur memutuskan untuk menggunakan Aplikasi Siswaskeudes sebagai alat bantu dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Untuk itu, Inspektur Kabupaten Simulasi menugaskan stafnya untuk meminta database kompilasi Siskeudes untuk tahun anggaran 2020 kepada Dinas PMD Kabupaten Simulasi.

# PELATIHAN 2.1 PENGATURAN PARAMETER

Anda sebagai salah seorang Inspektur Pembantu/Pengendali Teknis diminta untuk melakukan pengaturan parameter Aplikasi Siswaskeudes yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan sampling pemeriksaan.

#### Penjelasan:

Menu parameter pada Aplikasi Siswaskeudes terdiri dari tiga sub menu yaitu:

- 1) Referensi desa;
- 2) RKP Desa; dan

#### 3) Kriteria Aspek Nonkeuangan.

Kriteria Aspek Nonkeuangan terdiri dari Data SDM Pemdes, Data Geografis Desa, Data Pembinaan, dan Data Pengawasan dan lainnya.

#### Penentuan:

Tiap parameter tersebut mempunyai mekanisme pengaturan tersendiri. Pengaturan parameter ini akan digunakan sebagai dasar penentuan desa yang akan dijadikan sampel pemeriksaan berdasarkan skala risiko pada tahapan *Integrated Reviews*.

#### Latihan 2.1.1 - Parameter Referensi Desa

Masukkan data parameter kode & nama kecamatan dan desa ke dalam Aplikasi Siswaskeudes.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan : Referensi Desa
- Penjelasan :

Sub menu ini berisi informasi tentang kode & nama kecamatan dan desa yang dijadikan obyek Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh APIP.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Menu Parameter => Referensi Desa
  - 2) Untuk memunculkan informasi tersebut, maka kita cukup menarik data dari database Siskeudes dengan menekan tombol *load*.

#### Latihan 2.1.2 – Referensi Tanggal Penetapan RKP Desa

Masukkan data tanggal penetapan RKP Desa per masing-masing desa atas parameter data kode dan nama desa yang sebelumnya telah dimasukkan. (Nama kecamatan/desa dan data yang digunakan merupakan data *dummy*)

Tabel 2.1
Nama Desa dan Penetapan RKP Desa

No	Nama Desa	Tanggal RKP Desa
1	Desa Tonjong	15 Agustus 2019
2	Desa Citepus	15 Agustus 2019

No	Nama Desa	Tanggal RKP Desa
3	Desa Buniwangi	15 Agustus 2019
4	Desa Cidadap	30 Agustus 2019
5	Desa Loji	30 Agustus 2019
6	Desa Kertajaya	30 Agustus 2019
7	Desa Cikakak	30 Agustus 2019
8	Desa Cimaja	30 Agustus 2019
9	Desa Ridogalih	16 September 2019
10	Desa Bantargadung	16 September 2019
11	Desa Mangunjaya	16 September 2019
12	Desa Bojonggaling	16 September 2019
13	Desa Cisolok	16 September 2019
14	Desa Pasir Baru	16 September 2019
15	Desa Cikahuripan	30 September 2019
16	Desa Cikidang	30 September 2019
17	Desa Cikiray	30 September 2019
18	Desa Gunungmalang	30 September 2019
19	Desa Lengkong	30 September 2019
20	Desa Cilangkap	30 September 2019
21	Desa Tegallega	30 September 2019
22	Desa Jampang Tengah	15 November 2019
23	Desa Padabeunghar	15 November 2019
24	Desa Bantarpanjang	15 November 2019
25	Desa Cijulang	30 November 2019
26	Desa Warungkiara	30 November 2019
27	Desa Bojongkerta	30 November 2019
28	Desa Girijaya	30 November 2019
29	Desa Cikembar	30 November 2019
30	Desa Parakanlima	01 Desember 2019
31	Desa Bojong	01 Desember 2019

#### <u>Langkah Kerja</u>

• Sub Menu yang digunakan : RKP Desa

#### • Penjelasan

Sub menu ini berisi informasi mengenai tanggal penetapan RKP Desa per masingmasing desa yang akan dijadikan dasar untuk pemetaan risiko.

- Langkah penginputan
  - Untuk menyediakan informasi tersebut, maka secara umum yang kita lakukan adalah pertama menarik data parameter desa dari database Siskeudes
  - 2) Masukkan tanggal penetapan RKP Desa per masing-masing desa berdasarkan data yang kita telah peroleh sebelumnya.

Cara memasukkan data RKP sebagai berikut:

- a. Menu Parameter => RKP Desa
- b. Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- c. Masukan data tanggal penetapan RKP Desa

Untuk menginputkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui *interface* aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan data tanggal penetapan RKP-nya;
  - (2) Klik tombol ubah;
  - (3) Pilih tanggal sesuai data penetapan RKP;
  - (4) Klik tombol simpan;
  - (5) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa;
  - (6) Lalu klik tombol Tutup.
- a. Dengan bantuan Excel
  - (1) Klik tombol "Eksport Format Excel";
  - (2) Isikan tanggal penetapan RKP pada file excel yang telah tersedia untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam local disc komputer;
  - (3) Kembali ke Aplikasi Siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel";
  - (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada local disc komputer;
  - (5) Klik tombol Impor

- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka perlu diakukan pembetulan pada file excel, dan ulangi langkah impor angka (3) sampai dengan (5);
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

Catatan : Untuk keseragaman langkah pelatihan, silahkan impor file excel yang telah diberikan dalam paket pelatihan.

#### Latihan 2.1.3 – Referensi Kriteria Aspek Nonkeuangan

Sub menu ini berisi referensi kriteria yang digunakan dalam faktor-faktor yang sifatnya di luar aspek keuangan yang akan dijadikan dasar untuk pemetaan risiko pada tahapan *Integrated Reviu.* Faktor-faktor tersebut terdiri dari lima aspek yaitu:

Tabel 2.2
Aspek Nonkeuangan

1	SDM	Kualitas aparat/perangkat Pemerintahan Desa	
2	Geografis	Kondisi geografis desa	
3	Pembinaan	Banyaknya pembinaan yang telah diakukan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap aparat pemerintahan desa	
4	Pengawasan	Banyaknya pengawasan yang telah dilakukan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan keuangan desa	
5	Lainnya	Aspek lain yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penentuan risiko	

Dalam aplikasi, range skor risiko sudah ditentukan dengan angka 1 sampai dengan 5, dengan kategori Sangat Memadai, Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai, dan Sangat Tidak Memadai. Sedangkan Kriteria dari masing-masing kategori tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada desa di pemerintah daerah masing-masing. Contoh kriteria pada aspek nonkeuangan sebagai berikut:

1) Aspek SDM Aparatur Desa

Untuk Aspek SDM, simulasi yang digunakan dalam modul pelatihan ini adalah tingkat pendidikan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Contoh Penentuan Kriteria SDM

No	Kriteria: Tingkat Pendidikan Kepala Desa	Skor Risiko	Kategori
1.	>= S2	1	Sangat Memadai
2	S1/D4/D3	2	Memadai
3	SMA	3	Kurang Memadai
4	SMP	4	Tidak Memadai
5	SD/Tidak bersekolah	5	Sangat Tidak Memadai

#### 2) Aspek Geografis

Untuk Aspek Geografis, simulasi yang digunakan dalam modul pelatihan ini adalah pertimbangan akses transportasi, akses perbankan, akses informasi, akses kesehatan, dan akses jalan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Contoh Penentuan Kriteria Geografis

No	Kriteria: Jarak Kantor Desa ke ibukota Kab/Kota	Skor Risiko	Kategori
1.	Kelima akses memadai	1	Sangat Memadai
2	4 akses yang memadai	2	Memadai
3	3 akses yang memadai	3	Kurang Memadai
4	2 akses yang memadai	4	Tidak Memadai
5	Hanya 1 akses yang memadai atau tidak ada akses yang memadai	5	Sangat Tidak Memadai

#### 3) Aspek Pembinaan

Untuk Aspek Pembinaan, simulasi kriteria yang digunakan adalah Workhop Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti aparat pemerintahan desa dalam satu tahun, dalam bentuk kunjungan ataupun monitoring, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Contoh Penentuan Kriteria Pembinaan

No	Kriteria: Frekuensi Pembinaan terhadap Pemerintah Desa	Skor Risiko	Kategori
1.	Lebih dari 4 kali	1	Sangat Memadai
2	4 kali	2	Memadai
3	3 kali	3	Kurang Memadai
4	2 kali	4	Tidak Memadai
5	1 kali atau belum pernah workshop	5	Sangat Tidak Memadai

#### 4) Aspek Pengawasan

Simulasi kriteria yang digunakan adalah Frekuensi Pengawasan (BPK, APIP, Camat atau BPD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Contoh Penentuan Kriteria Pengawasan

No	Kriteria: Progres Tindak Lanjut Temuan	Skor Risiko	Kategori
1.	Lebih dari 4 kali	1	Sangat Memadai
2	4 kali	2	Memadai
3	3 kali	3	Kurang Memadai
4	2 kali	4	Tidak Memadai
5	1 kali atau belum pernah	5	Sangat Tidak Memadai

#### 5) Aspek Nonkeuangan Lainnya

Simulasi pada aspek nonkeuangan lainnya menggunakan indikator status desa sebagai kriteria, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Contoh Penentuan Kriteria Nonkeuangan Lainnya

No.	Kriteria	Skor Risiko	Kategori
1	Desa Mandiri	1	Sangat Memadai
2	Desa Maju	2	Memadai
3	Desa Berkembang	3	Kurang Memadai
4	Desa Tertinggal	4	Tidak Memadai
5	Desa Sangat Tertinggal	5	Sangat Tidak Memadai

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan : Kriteria Aspek Nonkeuangan
- Langkah Penginputan :

Untuk mengakomodir hal tersebut, maka dapat mempergunakan pengaturan aspek lainnya dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Menu Parameter => Kriteria Aspek Nonkeuangan;
- 2) Pilih Tab sesuai dengan kriteria aspek yang akan diinput;
- 3) Pilih (select) kriteria pertama lalu klik tombol ubah;
- 4) Isikan Kriteria sesuai table diatas;
- 5) Klik tombol simpan;
- 6) Lalukan hal yang sama untuk 4 kriteria berikutnya pada setiap aspek;
- 7) Klik tombol Tutup.

# PELATIHAN 2.2 PENGOLAHAN INFORMASI ASPEK KEUANGAN DAN ASPEK NONKEUANGAN

Anda sebagai salah seorang Inspektur Pembantu/Pengendali Teknis ditugaskan oleh Inspektur untuk mengolah informasi keuangan dan nonkeuangan yang telah diperoleh sebagai dasar untuk pemberian skor risiko tiap desa.

#### Penjelasan:

Pengolahan informasi keuangan dan nonkeuangan dilakukan pada menu *Integrated Reviews.* Menu ini secara umum terdiri dari dua fungsi yaitu pemetaan risiko berdasarkan aspek keuangan & nonkeuangan dan pengolahan skor risiko serta menyediakan fitur untuk membantu penerbitan surat tugas tim pemeriksaan.

#### Latihan 2.2.1 – Analisis Risiko Aspek Keuangan

Lakukan pengolahan informasi aspek keuangan dan lakukan pengolahan data ke dalam aplikasi Siswaskeudes. Aspek keuangan data sumbernya diolah berdasarkan analisis data keuangan desa yang berasal dari aplikasi Siskeudes.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan : Aspek Keuangan
- Penjelasan:

Sub menu aspek keuangan digunakan untuk memetakan risiko masing-masing desa dari aspek keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan. Dalam sub menu ini terdapat enam faktor yang dijadikan dasar dalam pemberian skor risiko yaitu:

Tabel 2.8
Faktor yang Mempengaruhi Skor Risiko Aspek Keuangan

No	Aspek Keuangan	Keterangan
1	Proporsi Belanja	Belanja operasional maksimal 30% anggaran
		Belanja Desa
2	SILPA Akhir Tahun	Perbandingan Jumlah SILPA tahun lalu terhadap jumlah APB Desa akhir tahun. Semakin kecil SILPA tahun lalu, realisasi anggaran semakin wajar.

No	Aspek Keuangan	Keterangan
3	Pencairan Dana Desa dari RKD	Perbandingan rata-rata pencairan dana melalui SPP terhadap jumlah penerimaan pendapatan desa. Semakin banyak SPP, rata-rata pencairan dana semakin wajar
4	Mekanisme Panjar	Penggunaan mekanisme panjar untuk pengeluaran belanja kegiatan yang harus segera dipertanggungjawabkan
5	Pemotongan Pajak	Perbandingan jumlah bukti /kuitansi yang telah dipungut/dipotong pajak terhadap jumlah bukti/kuitansi pengeluaran dengan nilai di atas Rp 2 Juta (PPN)
6	Penyetoran Pajak	Perbandingan jumlah bukti/kuitansi penyetoran pajak terhadap jumlah bukti/kuitansi pengeluaran yang telah dipungut/dipotong pajak

#### • Langkah Penginputan :

#### 1. Aspek Kesesuaian Proporsi Penggunaan Belanja APBDes

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Keuangan => Proporsi Belanja
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data Anggaran APBDes

Catatan : Perhatikan desa dengan rasio proporsi BOP lebih dari 30%. Desa dengan proporsi BOP lebih dari 30%, melampaui ketentuan dalam pasal 100 huruf (b) PP nomor 43 tahun 2014 jo PP nomor 11 tahun 2019.

# 2. Aspek Proporsi SILPA Akhir Tahun terhadap Penerimaan pada APBDes

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Keuangan => SILPA Akhir Tahun
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data SILPA

Catatan : Perhatikan desa dengan persentase proporsi SILPA dibandingkan penerimaan pendapatan lebih dari 30%. SILPA yang melebihi dari 30% mengindikasikan banyaknya kegiatan yang tertunda/terhambat pelaksanaannya.

#### 3. Aspek Pola Pencairan Dana dari RKD

- Menu Integrated Reviews => Aspek Keuangan => Pencairan Dana dari RKD
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data Pencairan dana dari RKD

Catatan: Perhatikan desa dengan persentase rata-rata nilai SPP dibandingkan dengan realisasi penerimaan lebih dari 20%. Distribusi pencairan dana yang semakin merata/atau kurang dari 20%, menunjukan pengambilan dana dari RKD disesuaikan dengan kebutuhan.

#### 4. Aspek Kewajaran Pengeluaran Belanja Kegiatan tanpa SPP Panjar

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Keuangan => Mekanisme Panjar
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data Panjar

Catatan : Perhatikan desa yang tidak mengimplementasikan mekanisme panjar.

#### 5. Aspek Pemotongan Pajak

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Keuangan => Pemotongan Pajak
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data potongan pajak

Catatan : Perhatikan desa dengan rasio jumlah bukti /kuitansi yang telah dipungut/dipotong pajak terhadap jumlah bukti/kuitansi pengeluaran yang wajib dipotong pajak. Rasio pemotongan pajak kurang dari 50%, mengindikasikan banyaknya kuitansi yang tidak dipotong pajak sesuai ketentuan.

#### 6. Aspek Penyetoran Pajak

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Keuangan => Penyetoran Pajak
- 2) Klik tombol Load untuk mengambil data Setoran Pajak

Catatan : Perhatikan desa dengan rasio jumlah bukti/kuitansi penyetoran pajak terhadap jumlah bukti/kuitansi pengeluaran yang telah dipungut/dipotong pajak kurang dari 50%. Rasio penyetoran pajak kurang dari 50%, mengindikasikan banyaknya pajak yang telah dipotong tetapi tidak disetorkan.

#### Latihan 2.2.2 - Analisis Risiko Aspek Nonkeuangan

Lakukan pengolahan informasi aspek nonkeuangan dan lakukan penginputan ke dalam aplikasi. Pengumpulan data aspek nonkeuangan dapat dilakukan melalui *input* kedalam aplikasi siswakeudes maupun mekanisme *export import file* excel.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan : Aspek Nonkeuangan
- Penjelasan:

Sub menu aspek nonkeuangan digunakan untuk memetakan risiko masing-masing desa dari aspek nonkeuangan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Sub menu ini terdiri dari tujuh faktor yang dijadikan dasar dalam pemberian skor risiko yaitu 6 faktor yang merupakan *default* aplikasi ditambah satu faktor lainnya yang bisa ditambahkan oleh APIP *(optional)*, yaitu:

Tabel 2.9
Faktor-faktor Nonkeuangan sebagai Dasar Pemberian Skor Risiko

No	Aspek Nonkeuangan	Keterangan	Kategori
1	Waktu Penetapan APBDes	Penetapan APBDes paling lambat tanggal 31 Desember	<ul><li>Tepat waktu;</li><li>Terlambat, &lt; 1 bulan;</li></ul>
		pada tahun anggaran sebelumnya	Terlambat, > 1 bulan s.d. < 2 bulan;
		,,	<ul><li>Terlambat, &gt; 2</li><li>bulan s.d. &lt; 3</li><li>bulan;</li></ul>
			<ul><li>Terlambat,&gt; 3</li><li>bulan atau tidak</li><li>ada data</li></ul>
2	Waktu Penetapan RKP Desa	Penetapan RKP Desa paling lambat tanggal 30 September	<ul><li>Tepat waktu;</li><li>Terlambat, &lt; 1 bulan;</li></ul>
	Title Desa	pada tahun anggaran	> Terlambat, > 1 bulan s.d. < 2
		sebelumnya	bulan; ➤ Terlambat, > 2 bulan s.d. < 3 bulan;

No	Aspek Nonkeuangan	Keterangan	Kategori
			<ul><li>Terlambat,&gt; 3</li><li>bulan atau tidak</li><li>ada data</li></ul>
3	SDM Perangkat Desa	Kompetensi/Kapabilitas SDM pengelola keuangan desa (Kepala desa, perangkat desa, BPD) berdasarkan pertimbangan latar belakang tingkat pendidikan, pelatihan pengelolaan keuangan desa yang telah diikuti, dan lama bekerja sebagai aparat pengurus dana desa	Kategori:  Sangat Memadai;  Memadai;  Kurang Memadai;  Tidak Memadai;  Sangat Tidak Memadai.  Kriteria disesuaikan dengan kondisi yang ada pada wilayah kerja APIP.
4	Geografis Desa	Kondisi geografis desa berdasarkan pertimbangan akses transportasi ke kecamatan dan kabupaten / kota yang terjangkau, akses jalan ke kantor perbankan memadai, dan akses jaringan internet/informasi memadai (tidak menggunakan mobile phone)	Kategori:  > Sangat Memadai; > Memadai; > Kurang Memadai; > Tidak Memadai; > Sangat Tidak Memadai.  Kriteria disesuaikan dengan kondisi yang ada pada wilayah kerja APIP.
5	Pembinaan kepada Desa	Dinas PMD Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara rutin melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan desa.  Jumlah pembinaan yang diterima desa dalam 1 tahun oleh kecamatan maupun Dinas	Kategori:  > Sangat Memadai; > Memadai; > Kurang Memadai; > Tidak Memadai; > Sangat Tidak Memadai.  Kriteria disesuaikan dengan kondisi yang

No	Aspek Nonkeuangan	Keterangan	Kategori
		PMD	ada pada wilayah kerja APIP.
6	Pengawasan di Desa	Pengawasan oleh APIP daerah dilakukan secara berkala, baik dalam bentuk: pemeriksaan, reviu,evaluasi maupun monitoring.  Dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh APIP, semakin jarang dilakukan, maka semakin berisiko	Kategori:  Sangat Memadai;  Memadai;  Kurang Memadai;  Tidak Memadai;  Sangat Tidak Memadai.  Kriteria disesuaikan dengan kondisi yang ada pada wilayah kerja APIP.
7	Aspek Nonkeuangan Lainnya	Faktor nonkeuangan lain yang ketersediaan datanya cukup dan dapat dimasukkan oleh APIP sebagai bahan pertimbangan dalam memilih desa sampel pemeriksaan	Kategori:  Sangat Memadai;  Memadai;  Kurang Memadai;  Tidak Memadai;  Sangat Tidak Memadai.  Kriteria disesuaikan dengan kondisi yang ada pada wilayah kerja APIP.

Catatan : Aspek nomor 1 dan 2 wajib digunakan, sedangkan untuk aspek nomor 3 sampai dengan 7 apabila tidak digunakan agar dinonaktifkan melalui menu tools – setting aspek nonkeuangan.

#### • Langkah Penginputan:

#### 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBDes

1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Nonkeuangan => Waktu Penetapan APBDes

2) Klik tombol Load untuk menarik data tanggal penetapan APBDes Catatan: Perhatikan desa yang penetapan APBDes 20X1 lebih dari tanggal 31 Desember 20X0.

#### 2. Ketepatan Waktu Penetapan RKP Desa

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Nonkeuangan => Waktu Penetapan RKP Desa
- 2) Klik tombol Load untuk menarik data tanggal penetapan RKP Desa Catatan: Perhatikan desa yang penetapan RKP Desa 20x1 lebih dari tanggal 30 September 20X0.

#### 3. Data Referensi Kompetensi SDM

- Menu Integrated Reviews => Aspek Nonkeuangan => SDM Perangkat Desa
- 2) Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- 3) Masukan hasil penilaian kompetensi tiap-tiap desa. Data berikut adalah hasil pendataan kompetensi SDM desa yang ada di Kabupaten Simulasi:

Tabel 2.10

Data Pendidikan Perangkat Desa

No	Nama Desa	Pendidikan terakhir	Skor
1	Desa Tonjong	S1	2
2	Desa Citepus	SMA	3
3	Desa Buniwangi	SMA	3
4	Desa Cidadap	SMA	3
5	Desa Loji	SMA	3
6	Desa Kertajaya	S1	2
7	Desa Cikakak	SMA	4
8	Desa Cimaja	SMA	3
9	Desa Ridogalih	SMA	3
10	Desa Bantargadung	SMA	4
11	Desa Mangunjaya	S1	2
12	Desa Bojonggaling	SMA	4
13	Desa Cisolok	SMA	3
14	Desa Pasir Baru	S1	2
15	Desa Cikahuripan	SMA	3
16	Desa Cikidang	SMA	3
17	Desa Cikiray	S1	2

No	Nama Desa	Pendidikan terakhir	Skor
18	Desa Gunungmalang	SMA	4
19	Desa Lengkong	SMA	4
20	Desa Cilangkap	SMA	3
21	Desa Tegallega	SMA	3
22	Desa Jampang Tengah	S1	2
23	Desa Padabeunghar	SMA	4
24	Desa Bantarpanjang	S1	2
25	Desa Cijulang	SMP	5
26	Desa Warungkiara	SMA	3
27	Desa Bojongkerta	S1	2
28	Desa Girijaya	S1	2
29	Desa Cikembar	SMP	5
30	Desa Parakanlima	SMA	3
31	Desa Bojong	S1	2

Untuk menginputkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui interface aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan kompetensi-nya;
  - (2) Klik tombol ubah;
  - (3) Masukkan data pendidikan terakhir kepala desa;
  - (4) Pilih kriteria pendidikan terakhir;
  - (5) Klik tombol simpan;
  - (6) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa;
  - (7) Lalu klik tombol Tutup.
- b. Dengan bantuan Excel
  - (1) Klik tombol "Eksport Format Excel";
  - (2) Isikan data pendidikan terakhir kepala desa dan isikan skor pada file excel yang telah tersedia untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam *local disc* komputer.
  - (3) Kembali ke aplikasi siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel"
  - (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada *local disc* komputer;
  - (5) Klik tombol Impor

- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka dilakukan pembetulan pada file excel;
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

Catatan : Untuk keseragaman langkah pelatihan, silahkan impor file excel yang telah diberikan dalam paket pelatihan.

#### 4. Data Referensi Geografis Desa

- 1) Menu Integrated Reviews => Aspek Nonkeuangan => Geografis Desa
- 2) Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- 3) Masukkan hasil penilaian kondisi tiap-tiap desa. Dari pengumpulan data kondisi geografis desa hanya ditemukan kondisi 15 desa dari jumlah keseluruhan 31 desa. Data berikut adalah hasil pendataan kondisi geografis desa yang ada di Kabupaten Simulasi:

Tabel 2.11
Data Geografis Desa

				Geografis			Skor
No	Nama Desa	Akses Alat	Akses	Akses	Akses	Akses	
		Transportasi	Perbankan	Informasi	Kesehatan	Jalan	
1	Desa Tonjong	Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Memadai	Memadai	2
2	Desa Citepus	Tidak	Tidak	Tidak	Memadai	Tidak	4
	Desa Citepus	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Т
3	Desa	Memadai	Tidak	Tidak	Memadai	Tidak	3
٥	Buniwangi	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	٠
4	Doca Cidadan	Momadai	Tidak	Tidak	Memadai	Memadai	2
4	Desa Cidadap	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	2
5	Doca Lo <del>i</del> i	Momadai	Tidak	Tidak	Tidak	Momadai	3
Э	Desa Loji	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	3
6	Desa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	5
О	Kertajaya	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	5
7	Doop Citalial	Money da:	Tidak	Tidak	Maranda:	Manadai	2
/	Desa Cikakak	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	2
	Dana Cimaria	Managala:	Tidak	Tidak	Tidak	Managada:	ſ
8	Desa Cimaja	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	3
9	Desa	Monanda:	Mana da:	Tidak	Mana da:	Manada:	4
9	Ridogalih	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	1
10	Desa	Momadai	Tidak	Tidak	Tidak	Momadai	2
10	Bantargadung	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	3

				Geografis			Skor
No	Nama Desa	Akses Alat Transportasi	Akses Perbankan	Akses Informasi	Akses Kesehatan	Akses Jalan	
11	Desa Mangunjaya	Memadai	Memadai	Tidak Memadai	Memadai	Memadai	1
12	Desa Bojonggaling	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	5
13	Desa Cisolok	Memadai	Memadai	Tidak Memadai	Memadai	Memadai	1
14	Desa Pasir Baru	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	5
15	Desa Cikahuripan	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Memadai	Tidak Memadai	4

Keterangan: Untuk desa yang tidak bisa disediakan informasi geografisnya di beri skor 5. Kelima unsur geografis diatas diinput pada kolom *Data Geografis* di aplikasi.

Untuk menginputkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui *interface* aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan data geografisnya
  - (2) Klik tombol ubah
  - (3) Masukkan data geografis desa sesuai unsur yang ada.
  - (4) Pilih kriteria kondisi geografis desa
  - (5) Klik tombol simpan
  - (6) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa
  - (7) Lalu klik tombol Tutup.
- b. Dengan bantuan Excel
  - (1) Klik tombol "Eksport Format Excel";
  - (2) Isikan data geografis dan skornya untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam *local disc* komputer;
  - (3) Kembali ke Aplikasi Siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel";
  - (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada *local disc* komputer;
  - (5) Klik tombol Impor;

- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka lalu pembetulan pada file excel;
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

#### 5. Data Referensi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Referensi pembinaan pengelolaan keuangan desa dapat diukur dari frekuensi Bimtek/Workshop/Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang pernah diikuti pemerintah desa. Untuk mengukur aspek tersebut, data frekuensi Bimtek/Workshop/Pelatihan yang pernah diikuti diinput kedalam aplikasi siswaskeudes dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menu Integrated Reviews => Aspek Nonkeuangan => Pembinaan Kepada Desa;
- 2) Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- 3) Masukkan hasil penilaian atas pembinaan pengelolaan keuangan desa yang telah diikuti oleh tiap-tiap desa. Data berikut adalah hasil pendataan pembinaan desa yang ada di Kabupaten Simulasi:

Tabel 2.12

Data Frekuensi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Jumlah Workhop Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti	Skor
1	Desa Tonjong	3 Kali	3
2	Desa Citepus	2 Kali	4
3	Desa Buniwangi	3 Kali	3
4	Desa Cidadap	4 Kali	2
5	Desa Loji	4 Kali	2
6	Desa Kertajaya	3 Kali	3
7	Desa Cikakak	3 Kali	3
8	Desa Cimaja	3 Kali	3
9	Desa Ridogalih	3 Kali	3
10	Desa Bantargadung	3 Kali	3
11	Desa Mangunjaya	3 Kali	3
12	Desa Bojonggaling	3 Kali	3
13	Desa Cisolok	3 Kali	3
14	Desa Pasir Baru	3 Kali	3
15	Desa Cikahuripan	Belum Pernah	5
16	Desa Cikidang	3 Kali	3

No	Nama Desa	Jumlah Workhop Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti	Skor
17	Desa Cikiray	3 Kali	3
18	Desa Gunungmalang	3 Kali	3
19	Desa Lengkong	3 Kali	3
20	Desa Cilangkap	3 Kali	3
21	Desa Tegallega	3 Kali	3
22	Desa Jampang Tengah	3 Kali	3
23	Desa Padabeunghar	3 Kali	3
24	Desa Bantarpanjang	3 Kali	3
25	Desa Cijulang	Belum Pernah	5
26	Desa Warungkiara	3 Kali	3
27	Desa Bojongkerta	2 Kali	4
28	Desa Girijaya	3 Kali	3
29	Desa Cikembar	3 Kali	3
30	Desa Parakanlima	3 Kali	3
31	Desa Bojong	3 Kali	3

Untuk menginputkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui *interface* aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan data pembinaannya;
  - (2) Klik tombol ubah;
  - (3) Masukkan data pembinaan desa;
  - (4) Pilih kriteria berdasarkan banyaknya pembinaan yang telah di ikuti oleh tiap-tiap desa;
  - (5) Klik tombol simpan;
  - (6) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa;
  - (7) Lalu klik tombol Tutup

#### b. Dengan bantuan Excel

- (1) Klik tombol "Export Format Excel"
- (2) Isikan data pembinaan dan skornya untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam *local disc* komputer;
- (3) Kembali ke aplikasi siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel";
- (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada local disc komputer;

- (5) Klik tombol Impor;
- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka lalu pembetulan pada file excel;
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

#### 6. Data Referensi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dihitung sebagai faktor risiko dapat berasal dari frekuensi pengawasan dari BPK, APIP, Camat atau BPD. Penghitungan faktor risiko tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Nonkeuangan => Pengawasan di Desa
- 2) Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- 3) Masukan hasil penilaian atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan kepada tiap-tiap desa. Contoh:

Tabel 2.13

Data Frekuensi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Frekuensi Pengawasan (BPK, APIP, Camat atau BPD)	Skor
1	Desa Tonjong	3 Kali	3
2	Desa Citepus	2 Kali	4
3	Desa Buniwangi	3 Kali	3
4	Desa Cidadap	2 Kali	4
5	Desa Loji	3 Kali	3
6	Desa Kertajaya	2 Kali	4
7	Desa Cikakak	3 Kali	3
8	Desa Cimaja	3 Kali	3
9	Desa Ridogalih	2 Kali	4
10	Desa Bantargadung	3 Kali	3
11	Desa Mangunjaya	3 Kali	3

No	Nama Desa	Frekuensi Pengawasan (BPK, APIP, Camat atau BPD)	Skor
12	Desa Bojonggaling	3 Kali	3
13	Desa Cisolok	2 Kali	4
14	Desa Pasir Baru	1 Kali	5
15	Desa Cikahuripan	0 Kali	5
16	Desa Cikidang	3 Kali	3
17	Desa Cikiray	1 Kali	5
18	Desa Gunungmalang	1 Kali	5
19	Desa Lengkong	1 Kali	5
20	Desa Cilangkap	3 Kali	3
21	Desa Tegallega	3 Kali	3
22	Desa Jampang Tengah	2 Kali	4
23	Desa Padabeunghar	3 Kali	3
24	Desa Bantarpanjang	3 Kali	3 5
25	Desa Cijulang	0 Kali	
26	Desa Warungkiara	3 Kali	3
27	Desa Bojongkerta	2 Kali	4
28	Desa Girijaya	1 Kali	5
29	Desa Cikembar	1 Kali	5
30	Desa Parakanlima	2 Kali	4
31	Desa Bojong	3 Kali	3

Atas kondisi tersebut, dapat dilakukan penginputan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui interface aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan data pengawasannya;
  - (2) Klik tombol ubah;
  - (3) Masukkan keterangan bahwa tidak pernah dilakukan kegiatan pengawasan sebelumnya;
  - (4) Pilih kriteria "Pengawasan oleh APIP lebih dari 4 tahun lalu";
  - (5) Klik tombol simpan;
  - (6) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa;
  - (7) Lalu klik tombol Tutup.
- b. Dengan bantuan Excel
  - (1) Klik tombol "Export Format Excel";
  - (2) Isikan keterangan bahwa tidak pernah dilakukan kegiatan pengawasan apapun dan berikan skor 5 untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam *local disc* komputer.

- (3) Kembali ke Aplikasi Siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel"
- (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada *local disc* komputer;
- (5) Klik tombol Impor;
- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka dilakukan pembetulan pada file excel;
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

#### 7. Data Aspek Lainnya

Salah satu contoh aspek lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur faktor risiko adalah status desa. Langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menu *Integrated Reviews* => Aspek Nonkeuangan => Aspek Nonkeuangan Lainnya
- 2) Klik tombol load untuk menarik data parameter kode dan nama desa dari database Siskeudes.
- 3) Masukkan hasil penilaian atas aspek nonkeuangan lainnya yang dalam hal ini adalah status desa yang telah diinput sebelumnya pada menu parameter. Berikut ini adalah data status desa Kabupaten Simulasi:

Tabel 2.14
Data Aspek Lainnya

No.	Nama Desa	Status Desa	Skor
1	Desa Tonjong	Desa Mandiri	1
2	Desa Citepus	Desa Maju	2
3	Desa Buniwangi	Desa Tertinggal	4
4	Desa Cidadap	Desa Berkembang	3
5	Desa Loji	Desa Berkembang	3
6	Desa Kertajaya	Desa Tertinggal	4

No.	Nama Desa	Status Desa	Skor
7	Desa Cikakak	Desa Berkembang	3
8	Desa Cimaja	Desa Tertinggal	4
9	Desa Ridogalih	Desa Berkembang	3
10	Desa Bantargadung	Desa Tertinggal	4
11	Desa Mangunjaya	Desa Berkembang	3
12	Desa Bojonggaling	Desa Maju	2
13	Desa Cisolok	Desa Tertinggal	4
14	Desa Pasir Baru	Desa Tertinggal	4
15	Desa Cikahuripan	Desa Maju	2
16	Desa Cikidang	Desa Tertinggal	4
17	Desa Cikiray	Desa Sangat Tertinggal	5
18	Desa Gunungmalang	Desa Berkembang	3
19	Desa Lengkong	Desa Sangat Tertinggal	5
20	Desa Cilangkap	Desa Sangat Tertinggal	5
21	Desa Tegallega	Desa Mandiri	1
22	Desa Jampang Tengah	Desa Sangat Tertinggal	5
23	Desa Padabeunghar	Desa Berkembang	3
24	Desa Bantarpanjang	Desa Sangat Tertinggal	5
25	Desa Cijulang	Desa Sangat Tertinggal	5
26	Desa Warungkiara	Desa Maju	2
27	Desa Bojongkerta	Desa Sangat Tertinggal	5
28	Desa Girijaya	Desa Mandiri	1
29	Desa Cikembar	Desa Sangat Tertinggal	5
30	Desa Parakanlima	Desa Berkembang	3
31	Desa Bojong	Desa Sangat Tertinggal	5

Untuk menginputkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Manual melalui *interface* aplikasi
  - (1) Klik salah satu desa yang ingin dimasukkan data penilaian aspek nonkeuangan lainnya;
  - (2) Klik tombol ubah;
  - (3) Masukkan keterangan pada data aspek lainnya sesuai data yang telah didapatkan;
  - (4) Pilih kriteria berdasarkan hasil penilaian atas aspek nonkeuangan lainnya;
  - (5) Klik tombol simpan;
  - (6) Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing desa;
  - (7) Lalu klik tombol Tutup.

# b. Dengan bantuan Excel

- Klik tombol "Export Format Excel";
- (2) Masukan keterangan pada data aspek lainnya sesuai data yang telah didapatkan untuk masing-masing desa lalu simpan (save) file excel tersebut ke dalam *local disc* komputer;
- (3) Kembali ke Aplikasi Siswaskeudes lalu klik tombol "Import Format Excel";
- (4) Klik tombol kotak dengan tiga titik ( ) lalu temukan file excel yang tadi telah dibuat dan disimpan pada *local disc* komputer;
- (5) Klik tombol Impor;
- (6) Jika ada notifikasi proses impor gagal maka lalu pembetulan pada file excel;
- (7) Lalu klik tombol Tutup.

# PELATIHAN 2.3 PEMILIHAN DESA SAMPEL PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN SURAT TUGAS

Anda sebagai salah seorang Inspektur Pembantu/Pengendali Teknis ditugaskan oleh Inspektur untuk menentukan sampel desa yang akan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu anda diminta untuk melakukan pembagian tim pemeriksaan pengelolaan keuangan desa sampai dengan penerbitan surat tugas.

# Penjelasan:

Penentuan desa sampel dilakukan berdasarkan pemetaan risiko yang bersumber pada Informasi keuangan dan nonkeuangan yang telah diinputkan sebelumnya. Khusus untuk informasi aspek nonkeuangan, dapat dipilih faktor-faktor mana saja yang dimasukkan dalam perhitungan risiko dan mana yang tidak apabila datanya tidak mendukung.

# **Latihan 2.3.1 - Penentuan Desa Sampel**

Tentukan skor risiko tiap-tiap desa berdasarkan informasi keuangan dan nonkeuangan.

Inspektur Kabupaten Simulasi menyampaikan adanya beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu:

- 1) Karena tidak semua informasi geografis desa dapat diperoleh, maka faktor tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan risiko.
- 2) Berdasarkan PKPT Inspektorat Kabupaten Simulasi, jumlah desa yang menjadi sampel pemeriksaan adalah sebanyak 10 desa dari 31 desa. Untuk itu diambil 9 peringkat teratas desa yang memiliki skor risiko tertinggi ditambah satu desa yaitu Desa Cijulang dengan pertimbangan meskipun secara skor risiko rendah, tetapi Desa Cijulang dilaporkan banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan : Rekapitulasi Skor Risiko
- Penjelasan:

Sub menu Rekapitulasi Skor Risiko menyajikan informasi berupa total skor risiko tiap-tiap desa berdasarkan faktor-faktor pada aspek keuangan dan aspek nonkeuangan yang telah diinput sebelumnya. Total skor untuk tiap desa dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan sampel desa pemeriksaan.

Untuk mengeluarkan faktor geografis dari aspek nonkeuangan dapat dilakukan dengan langkah berikut:

- 1. Menu Tools => Setting Aspek Nonkeuangan;
- 2. Klik tombol ubah;
- 3. Hilangkan tanda centang dari faktor geografis;
- 4. Klik simpan;
- 5. Klik Tutup.
- Langkah Pengoperasian :
  - 1. Menu Integrated Reviews => Rekapitulasi Skor Risiko.
  - 2. Skor risiko tiap desa dapat ditampilkan untuk semua desa dan per kecamatan.

- 3. Beri tanda centang pada desa yang akan dijadikan sampel pemeriksaan lalu klik tombol proses.
  - Keterangan : Berdasarkan instruksi dari Inspektur maka desa yang dijadikan sampel pemeriksaan adalah 10 desa dengan skor tertinggi.
- 4. Untuk melihat desa yang sudah dijadikan sampel dapat dilihat pada tab "Desa Sampel".
  - Keterangan : Untuk mengeluarkan desa yang telah menjadi sampel pemeriksaan, maka silahkan pilih desa yang akan dikeluarkan dari tab desa sampel lalu klik tombol hapus.
- 5. Setelah itu tambahan keterangan pada tiap desa sampel (jika diperlukan) dengan klik tombol keterangan pada desa yang akan ditambahkan keterangan lalu klik tombol ubah, setelah itu klik tombol simpan.
  - Keterangan : Tambahkan keterangan pada Desa Cijulang bahwa desa ini dilaporkan banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa.
- 6. Klik Tutup.

# **Latihan 2.3.2 – Penyusunan Surat Tugas**

Susunlah surat tugas dengan pertimbangan jumlah SDM APIP dan jumlah desa sampel pemeriksaan.

### Kondisi:

Berdasarkan data pegawai, jumlah APIP yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Simulasi adalah sebanyak 15 orang, namun pada saat pemeriksaan ini akan berlangsung, sebanyak 7 pegawai sedang menjalankan penugasan lain. Data pegawai APIP yang tersedia sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15

Data Pegawai Tersedia untuk Penugasan

No	Nama	Nama NIP	
Peja	bat Struktural		
Ai Verdani		19670101 198702 1 002	Inspektur
Tiara Kiranawati		19710202 199103 1 002	Inspektur Pembantu II

No	Nama	NIP	Jabatan
Peja	abat Fungsional Audito	or (PFA)	
1	Mohammad Syukur	19750303 199504 1 001	Auditor Madya
2	Dilla Unangsari	19750404 199505 1 002	Auditor Madya
3	Aldo Swastika	19810505 200106 1 001	Auditor Muda
4	Tiwi Nuraini	19810606 200107 1 002	Auditor Muda
5	Ardi Lezmana	19850707 200508 1 001	Auditor Pertama
6	Emil Setyaningsih	19850808 200509 1 002	Auditor Pertama
7	Olla Rahman	19890909 200910 1 002	Auditor Pelaksana
8	Ebes Susilo	19890102 200911 1 001	Auditor Pelaksana

Inspektur memberikan instruksi bahwa seluruh PFA yang akan ditugaskan dibagi menjadi 2 tim dimana tiap tim mengampu 5 desa sampel dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Pembagian Wilayah Desa per Tim

No	Tim 1	Tim 2
1	Desa Gunung Malang	Desa Cikembar
2	Desa Padabeunghar	Desa Bantargadung
3	Desa Kertajaya	Desa Cijulang
4	Desa Lengkong	Desa Bojongkerta
5	Desa Bojonggaling	Desa Girijaya

# Langkah Kerja

• Sub Menu yang digunakan : Surat Tugas

• Penjelasan:

Sub menu Surat Tugas ini digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan surat tugas.

- Langkah Pengoperasian:
  - 1. Menu Integrated Reviews => Surat Tugas
  - 2. Untuk menginput informasi umum surat tugas, klik tombol tambah lalu masukkan data penugasan berikut ini:

Nomor : 001/INSP/2021 dan 002/INSP/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Hari Penugasan : 15 Hari

Tanggal Mulai : 11 Januari 2021

Tanggal selesai : 29 Januari 2021

Uraian : Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa pada desa . .

(sesuai nama desa sampel)

Lalu Klik tombol Simpan

3. Untuk menginput nama – nama tim penugasan klik dua kali pada data surat tugas yang akan diisikan nama timnya lalu klik tambah. Kemudian isikan data berikut ini:

Tabel 2.17
Tim Penugasan

No.	Uraian	001/INSP/2021	002/INSP/2021	
1	Penanggungjawab	Ai Verdani		
2	Wakil Penanggungjawab	Tiara Kiranawati		
3	Pengendali Teknis	Mohammad Syukur	Dilla Unangsari	
4	Ketua Tim	Aldo Swastika	Tiwi Nuraini	
5	Anggota Tim 1	Ardi Lezmana	Emil Setyaningsih	
6	Anggota Tim 2	Olla Rahman	Ebes Susilo	

Lalu Klik tombol Simpan

- 4. Untuk memasukkan informasi nama desa yang menjadi sampel pemeriksaan tiap tim, klik tab Desa sampel lalu klik tombol tambah. Lalu centang sesuai nama desa yang akan dipilih menjadi sampel tiap tim penugasan.
- 5. Klik Tutup.

# **BAB III**

# PELATIHAN SURVEI PENDAHULUAN DAN UJI SPI

### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami mekanisme melakukan survei pendahuluan dan pengujian Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes.

Setelah surat tugas terbit, tim pemeriksa mulai melaksanakan tahapan pemeriksaan rinci pada masing-masing desa yang ditentukan sebagai sampel pemeriksaan. Namun sebelum masuk ke uji substantif atas aspek-aspek keuangan obyek pemeriksaan, untuk mendapat gambaran lebih jelas tentang obyek pemeriksaan tersebut dan lebih memfokuskan kegiatan pemeriksaan pada hal-hal yang krusial maka perlu dilakukan kegiatan survei pendahuluan dan pengujian SPI pada masing-masing obyek pemeriksaan.

Agar memudahkan simulasi penginputan, pada uraian bab ini pembahasan akan difokuskan pada pelaksanaan pemeriksaan rinci di Desa Cijulang. Untuk itu langkah awal dalam melakukan semua aktivitas pada menu pemeriksaan rinci adalah pemilihan desa sampel yang akan kita lakukan pemeriksaan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke menu Pemeriksaan Rinci Pilih Desa;
- 2) Pilih Surat Tugas Nomor 002/INSP/2021;
- 3) Pilih Desa Cijulang dan tekan tombol Pilih.

# PELATIHAN 3.1

### **SURVEI PENDAHULUAN**

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan survei pendahuluan pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

# Penjelasan:

Survei Pendahuluan pada Aplikasi Siswaskeudes dilakukan dengan dua Kertas Kerja Dukungan (KKD) yaitu KKD data umum desa dan KKD anggaran dan realisasi (KKD2). Setelah itu, kedua kesimpulan dari kedua KKD tersebut akan dirangkum pada Kertas Kertas Utama (KKU).

# Latihan 3.1.1 – Kertas Kerja Dukungan Data Umum

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan survei pendahuluan terkait data umum Desa Cijulang.

# Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Survei Pendahuluan Tab KKD1
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai latar belakang obyek yang diperiksa (Desa Cijulang) dan informasi keberadaan infrastruktur dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa.

- Langkah Penginputan:
  - Klik tambah lalu isikan informasi umum mengenai Pemerintahan Desa.
     Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam Survei Pendahuluan sebagai berikut:
    - a. Perangkat Desa

Nama Kades : Andika Abuya

Nomor SK : 089/SK/BUP/2018

Tanggal SK : 07/06/2018

Nama Sekdes : Wardono

Nomor SK : 090/SK/BUP/2018

Tanggal SK : 07/06/2018

Kaur Keuangan : Rafii

Nomor SK : 091/SK/BUP/2018

Tanggal SK : 07/06/2018

b. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

**RPJM Desa** 

Nomor Perdes : 01/PERDES/BGB/2018

Tanggal Perdes : 10/06/2018

RKP Desa

Nomor : 023/BGB/2018

Tanggal : 30/11/2018

APB Desa

Nomor Perdes : 08/PERDES/BGB/2018

Tanggal Perdes : 31/12/2018

c. Peraturan Kepala Daerah (yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten)

Pengelolaan Keuangan Desa

Nomor : 034/PERBUP/2019

Tanggal : 28/12/2019

Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Nomor : 035/PERBUP/2019

Tanggal : 28/12/2019

Penetapan Pagu Dana Desa dan Alokasi DD

No & Tgl. Penetapan : 098/PERBUP/2019

Tanggal : 20/12/2019

Penetapan Prioritas Penggunaan DD

No & Tgl. Penetapan : 098/PERBUP/2019

Tanggal : 20/12/2019

2) Klik Simpan.

3) Cetak KKD1 dan dokumentasikan dengan tertib dan rapi.

4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 16 Januari 2021

1. Perangkat desa telah ditetapkan dengan SK Kepala Desa,

2. Penetapan RPKDes Desa Cijulang terlambat namun APBDes ditetapkan tepat waktu, dan

3. Pengelolaan keuangan desa telah di atur oleh peraturan kepala daerah.

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 17 Januari 2021.

# Latihan 3.1.2 - Kertas Kerja Dukungan Realisasi Anggaran

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan survei pendahuluan terkait anggaran dan realisasi Desa Cijulang.

# Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Survei Pendahuluan Tab KKD2
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai anggaran dan realisasi obyek yang diperiksa (Desa Cijulang) dan lakukan inventarisasi kemungkinan adanya permasalahan terkait penyerapan anggaran.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Load untuk mengunduh data rincian APBDes dan realisasinya sampai muncul tabel realisasi APBDes Tahun 2019.
  - 2) Cermati capaian realisasi APBDes dan identifikasi kemungkinan adanya permasalahan penyerapan anggaran.
  - 3) Cetak KKD2 dan dokumentasikan dengan tertib dan rapi.
  - 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan.

### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 16 Januari 2021

Terdapat 7 (tujuh) mata anggaran yang tidak di realisasikan

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 17 Januari 2021.

# Latihan 3.1.3 – Kertas Kerja Utama

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

# Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Survei Pendahuluan Tab KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan atau permasalahan lainnya atas pengujian substantif atas kegiatan survei pendahuluan yang telah dilakukan.

• Langkah Penginputan:

# 1. Kesimpulan Utama

Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 20 Januari 2021

- Walaupun APBDes telah ditetapkan sebelum akhir tahun 2019 namun Penetapan RKPDes Desa Cijulang mengalami keterlambatan
- 2. Terdapat beberapa mata anggaran yang tidak di realisasikan sampai denga akhir tahun

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 20 Januari 2021.

# 2. Temuan

Tidak ada temuan dari kegiatan ini

# 3. Permasalahan lainnya

Tidak ada permasalahan lainnya dari kegiatan ini

### **PELATIHAN 3.2**

# **UJI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian SPI pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

# Penjelasan:

Uji SPI pada Aplikasi Siswaskeudes dilakukan pada lima unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi dan Pemantauan & Pengendalian.

# Latihan 3.2.1 - Pengujian Sistem Pengendalian Internal

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian SPI Desa Cijulang.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji SPI
- Penjelasan:

Pengujian SPI pada Aplikasi Siswaskeudes merupakan pengujian sederhana atas lima unsur SPIP yang bertujuan untuk memahami efektivitas pengendalian intern yang berlaku pada pemerintahan desa.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Masuk ke sub menu Uji SPI;
  - 2) Masukkan penilaian atas lima unsur SPI.

# a) Unsur Lingkungan Pengendalian

- (1) Klik tombol Unsur 1
- (2) Berikan tanda centang pertanyaan yang mempunyai jawaban "ya"

  Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam pengujian atas SPI, kelemahan lingkungan pengendalian terdeteksi sebagai berikut :
  - (a) Kaur Keuangan dan/atau Sekretaris Desa dan/atau Kepala DesaCijulang belum pernah mengikuti pendidikan/pelatihan terkaitPengelolaan Keuangan Desa

- (b) Terdapat formasi keanggotaan BPD tidak lengkap (kosong)
- (c) Telah ada penetapan struktur organisasi maupun uraian tugas masing-masing perangkat desa secara formal
- (d) Sebagian anggota BPD belum pernah mengikuti pendidikan/pelatihan terkait Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018)
- (e) Jumlah dan komposisi keanggotaan BPD tidak sesuai ketentuan.

  Dari informasi di atas maka jawaban atas tiap pertanyaan pada unsur lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pertanyaan pada Unsur Lingkungan Pengendalian

Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
<b>√</b>	01.01	Apakah ada struktur organisasi dan uraian tugas yang sudah diformalkan ?	
<b>√</b>	01.02	Apakah ada uraian tugas dan sudah dikomunikasikan kepada perangkat desa?	
√	01.03	Apakah Struktur organisasi pemerintah desa sudah terisi seluruhnya?	
√	01.04	Apakah Kepala Desa dijabat Definitif?	
√	01.05	Apakah terdapat SK Penetapan atas perangkat desa?	
х	01.06	Apakah para pengelola keuangan desa pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan desa?	
√	01.07	Apakah BPD sudah terbentuk?	
Х	01.08	Apakah keanggotaan BPD sudah terisi seluruhnya?	
х	01.09	Apakah ada struktur organisasi dan uraian tugas yang sudah diformalkan ?	
Х	01.10	Apakah Anggota BPD telah memperoleh pelatihan?	
Х	01.11	Apakah Komposisi BPD sesuai ketentuan?	

- (3) Klik proses
- (4) Klik Ok
- b) Unsur Penilaian risiko
  - (1) Klik tombol Unsur 2

- (2) Berikan tanda centang pertanyaan yang mempunyai jawaban "ya"

  Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam pengujian atas SPI, kelemahan penilaian risiko terdeteksi adalah sebagai berikut:
  - 1. RPJMDes telah ditetapkan dengan Perdes namun tidak memuat tujuan dan sasaran.
  - Tidak ada dokumentasi hasil identifikasi risiko-risiko ataupun permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, baik tertuang dalam RPJMDes, rancangan RKPDes, BA Musdes, dan dokumen lainnya.

Dari informasi di atas maka jawaban terhadap tiap pertanyaan pada unsur penilaian risiko adalah **tidak ada** yang dicentang karena semua kondisi tidak terpenuhi:

Tabel 3.2
Pertanyaan pada Unsur Penilaian Risiko

Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
√	02.01	Apakah Desa Sudah memiliki RPJMDesa?	
х	02.02	Apakah dalam RPJMDesa telah ditetapkan: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ?	
х	02.03	Apakah desa sudah memiliki RKPDesa yang selaras dengan RPJMDesa?	
Х	02.04	Apakah telah ada identifikasi risiko?	

- (3) Klik proses
- (4) Klik Ok
- c) Unsur Kegiatan Pengendalian
  - (1) Klik tombol Unsur 3
  - (2) Berikan tanda centang pertanyaan yang mempunyai jawaban "ya"

    Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam pengujian atas SPI, kelemahan kegiatan pengendalian terdeteksi sebagai berikut :

- (a) Kaur Keuangan maupun staf terkait belum melakukan penatauasahaan keuangan desa secara tertib dan tepat waktu (termasuk penatausahaan pada Aplikasi Siskeudes)
- (b) Kaur Keuangan maupun staf terkait belum melakukan pelaporan keuangan secara tertib
- (c) Jumlah uang kas/tunai di Bendahara cukup besar, melebihi batas maksimum ketentuan yang berlaku *(atau best practice)*
- (d) Pencatatan atas aset desa belum dilakukan secara memadai, baik terkait jenis aset, harga perolehan, tahun perolehan, dll.
- (e) Pemerintah Desa belum melakukan inventarisasi atas aset desa
- (f) Terdapat transaksi pengeluaran keuangan desa yang tidak dilakukan proses otorisasi secara memadai oleh Pihak terkait (Kades, Kaur Keuangan, pihak terkait lainnya)
- (g) Kaur Keuangan maupun staf terkait belum mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes secara memadai (proses input tidak tertib, proses input belum mencakup semua siklus penatausahaan keuangan, dll)

Dari informasi di atas maka jawaban terhadap tiap pertanyaan pada unsur kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pertanyaan pada Unsur Kegiatan Pengendalian

Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
√	03.01	Apakah ada pemisahan tugas antara pelaksana kegiatan dengan Kaur Keuangan Desa?	
X	03.02	apakah Kaur Keuangan telah melakukan penatausahaan keuangan secara tertib dan tepat waktu?	
Х	03.03	Apakah Kaur Keuangan telah melakukan pelaporan bulanan secara tertib?	
√	03.04	Apakah pemegang kas dilakukan oleh Kaur Keuangan desa?	
Х	03.05	Apakah besaran kas tunai di kaur Keuangan tidak melebihi batasan maksimum yang ditentukan?	

Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
√	03.06	Apakah pengambilan uang di bank hanya dilakukan dengan spesimen tandatangan lebih dari 1 orang?	
Х	03.07	Apakah aset desa telah dicatat secara memadai?	
Х	03.08	Apakah desa telah melakukan inventarisasi aset desa?	
Х	03.09	Apakah seluruh transaksi pengeluaran APBdesa telah dilakukan otorisasi oleh pihak yang tepat?	
Х	03.10	Apakah sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes secara memadai?	

- (3) Klik proses
- (4) Klik Ok
- d) Informasi & komunikasi
  - (1) Klik tombol Unsur 4
  - (2) Berikan tanda centang pertanyaan yang mempunyai jawaban "ya"

    Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam
    pengujian atas SPI, kelemahan informasi dan komunikasi terdeteksi
    sebagai berikut:
    - (a) Pemerintah Desa belum menyampaikan LRA kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tepat waktu
    - (b) Pemerintah Desa belum menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa secara memadai
    - (c) Pemerintah Desa belum menyusun laporan program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
    - (d) Pemerintah Desa belum memiliki media/alamat pengaduan masyarakat dan/atau belum mempublikasikannya

Dari informasi di atas maka jawaban atas tiap pertanyaan pada unsur penilaian risiko adalah **tidak ada** yang di centang karena semua kondisi tidak terpenuhi:

Tabel 3.4
Pertanyaan pada Unsur Penilaian Risiko

		<u></u>	
Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
Х	04.01	Apakah Kades telah menyampaikan LRA kepada Bupati/ walikota melalui camat secara tepat waktu?	
Х	04.02	Apakah Kepala Desa telah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa?	
х	04.03	Apakah Kepala Desa telah menyusun Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa?	
Х	04.04	Apakah Pemerintah Desa telah mempublikasikan APBDes dan realisasinya kepada Masyarakat?	
Х	04.05	Apakah kepala desa telah mempublikaskan alamat pengaduan masyarakat?	

- (3) Klik proses
- (4) Klik Ok
- e) Pemantauan & Pengendalian
  - (1) Klik tombol Unsur 5
  - (2) Berikan tanda centang pertanyaan yang mempunyai jawaban "ya"

    Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara, dan observasi dalam pengujian atas SPI, kelemahan pemantauan & pengendalian terdeteksi sebagai berikut :
    - (a) Pemerintah Desa tidak melaksanakan rapat rutin/berkala untuk membahas perkembangan pelaksanaan program/kegiatan desa (tidak ada bukti dokumentasinya, notulen, daftar hadir,dll.)
    - (b) Tidak ada laporan hasil pengawasan pemerintahan desa oleh BPD secara berkala
    - (c) Pemerintah desa tidak beritikad dengan baik untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan dari inspektorat
    - (d) Pemerintah desa telah membuka pengaduan dari masyarakat tetapi belum ada mekanisme tindak lanjut atas pengaduan tersebut

Dari informasi di atas maka jawaban terhadap tiap pertanyaan pada unsur kegiatan pemantauan & pengendalian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pertanyaan pada Unsur Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian

Cek	Kode	Uraian Pertanyaan	
Х	05.01	Apakah ada rapat rutin Pemerintah Desa membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan?	
Х	05.02	Apakah ada laporan hasil pengawasan BPD?	
√	05.03	Apakah ada pemantauan dari pemerintah Kabupaten/kota dan / atau kecamatan?	
√	05.04	Apakah temuan pemeriksaan telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa?	
Х	05.05	Apakah pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa?	

- (3) Klik proses
- (4) Klik Ok
- 3) Cetak uji SPI dan dokumentasikan dengan tertib dan rapi.
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan.

### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 17 Januari 2021

Berdasarkan hasil pengujian SPI didapati bahwa penerapan SPI pada desa Cijulang berada pada kategori kurang memadai dimana Unsur SPI yang paling rendah adalah unsur penilaian risiko dan informasi dan komunikasi

# **BAB IV**

# PELATIHAN UJI SUBSTANTIF

### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami mekanisme pengujian substansi atas aspek-aspek yang tersedia pada aplikasi dan dapat menghasilkan kertas kerja atas tiap pengujian tersebut.

<del>- engajian papsiano alao i ropeo i erencanaan pada apinabi pibwabicadeb terain dan</del>

8 aspek pengujian yaitu perencanaan, pendapatan, belanja, pembiayaan, pengadaan barang jasa, perpajakan, aset desa dan pemanfaatan. Pada masing-masing aspek pengujian telah tersedia Program Kerja Pemeriksaan (PKP) beserta beberapa Kertas Kerja (KK) yang akan terangkum pada Kertas Kerja Utama. Pada Kertas Kerja Utama inilah auditor dapat menginput temuan atau permasalahan lainnya yang ditemukan dari hasil menjalankan Program Kerja Pemeriksaan.

### **PELATIHAN 4.1**

# PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PROSES PERENCANAAN

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas proses perencanaan pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

### Penjelasan:

Pengujian substantif atas proses perencanaan terdiri dari dua kertas kerja yaitu kertas kerja pengujian Proses Penyusunan RKPDesa dan kertas kerja pengujian Proses Penyusunan APBDesa.

### Latihan 4.1.1 – Uji Substantif Proses Penyusunan RKPDesa

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas Proses Penyusunan RKPDesa.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Perencanaan –
   Tab Proses RKPDesa
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan dan penetapan RKPDesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Load
  - 2) Akan muncul daftar pertanyaan terkait proses Penyusunan RPKDesa, klik Verifikasi untuk menjawab Ya atau Tidak, dan isi keterangan yang mendukung jawaban. Berikut simulasi jawaban dan keterangannya:

Tabel 4.1
Pertanyaan terkait Proses Penyusunan RKPDesa

No.	Pertanyaan	Jawab (Ya/Tidak)	Keterangan
1	Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Ya	RKPDes disusun melalui Musyawarah Desa (MusDes), yang dilaksanakan tanggal 20 September 2019, 26 Oktober 2019, dan 15 November 2019
2	Pembentukan tim penyusun RKP Desa	Ya	Pemerintah Desa telah membentuk Tim Penyusun RKPDes sesuai SK Kepala Desa Nomor: 017/2018 tanggal 14 Agustus 2019.
3	Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Tidak	Dalam penyusunan RKPDes, Tim telah mempertimbangkan pagu indikatif desa. Namun, dalam penyusunan RKPDes tidak diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Tim telah melakukan pencermatan terhadap program/kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
4	Penyusunan rancangan RKP Desa	Ya	Tim telah menyusun rancangan RKPDes pada tanggal 2 September 2019

No.	Pertanyaan	Jawab (Ya/Tidak)	Keterangan
5	Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Ya	RKPDes telah disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
6	Penetapan RKP Desa	Ya	Telah ditetapkan sesuai Peraturan Desa Nomor: 023/BGB/2019 tanggal 11 November 2019

- 3) Bukti dukung atas jawaban tersebut didokumentasikan dengan tertib dan rapi;
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas Proses Penyusunan RKPDesa.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 16 Januari 2021

Pemerintah Desa Cijulang mengalami keterlambatan dalam penetapan RKPDes. Berdasarkan hasil klarifikasi, penyebab keterlambatan tersebut adalah karena Kabupaten Simulasi terlambat menerbitkan pagu indikatif Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 17 Januari 2021.

# Latihan 4.1.2 - Uji Substantif Proses Penyusunan APBDesa

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas Proses Penyusunan APBDesa.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Perencanaan –
   Tab Proses APBDesa
- Penielasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBDesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Load
  - 2) Akan muncul daftar pertanyaan terkait proses Penyusunan APBDesa, klik Verifikasi untuk menjawab Ya atau Tidak, dan isi keterangan yang mendukung jawaban. Berikut simulasi jawaban dan keterangannya:

Tabel 4.2
Pertanyaan terkait Proses Penyusunan APBDesa

No.	Pertanyaan	Jawab (Ya/Tidak)	Keterangan
1	Apakah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan?	Tidak	Sekretaris telah menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes pada tanggal 30 November 2019, namun tidak sepenuhnya memperhatikan RKPDes (karena penyusunan RKPDes terlambat)
2	Apakah Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama?	Ya	Rancangan APBDes telah disampaikan oleh Sekretaris kepada Kepala Desa pada tanggal 1 Desember 2019, dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 3 Desember 2019
3	Apakah Rancangan Peraturan Desa tetang APBDesa yang telah disepakati bersama telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain ?	Ya	RAPBDes telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD pada tanggal 9 Desember 2019, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada tanggal 11 Desember 2019

No.	Pertanyaan	Jawab (Ya/Tidak)	Keterangan
4	Apakah rancangan APBDesa telah dievaluasi	Ya	RAPBDes telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota pada tanggal 25
	oleh Kabupaten atau Kecamatan?		Desember 2019 dan ditetapkan sesuai Peraturan Desa Nomor: 02/PERDES/BGB/2019 tanggal 28 Desember 2019
5	Apakah ada realisasi kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDesa?	Tidak	-
6	Pembentukan tim penyusun APBDesa	Ya	Pemerintah Desa telah membentuk Tim
7	Penetapan APBDesa	Ya	Telah ditetapkan sesuai Peraturan Desa Nomor: 023/BGB/2019 tanggal 11 November 2019

- 3) Bukti dukung atas jawaban tersebut didokumentasikan dengan tertib dan rapi;
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas Proses Penyusunan APBDesa.

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 16 Januari 2021

APBDesa Pemerintah Desa Cijulang Tahun Anggaran 2019 telah disusun dan ditetapkan, tetapi dalam prosesnya Pemerintah Desa Cijulang tidak sepenuhnya memperhatikan RKPDesa. Hal ini disebabkan karena keterlambatan Tim Penyusun RKPDesa dalam menyusun RKPDesa

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Mohammad Syukur pada 17 Januari 2021.

# Latihan 4.1.3 – Kesimpulan dari Uji Substantif Perencanaan

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Tab KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas proses perencanaan.

• Langkah Penginputan:

# 1. Kesimpulan Utama

1) Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

# **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 20 Januari 2020

Keterlambatan Penetapan RKPDes disebabkan lambatnya penetapan pagu indikatif dari Kabupaten Simulasi. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan RAPBDes yang tidak selaras dengan RKPDes

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 20 Januari 2020.

### 2. Temuan

Tidak ada temuan dari kegiatan ini.

### 3. Permasalahan lainnya

- 1) Klik tombol "lainnya" untuk menginput permasalahan lainnya.
- 2) Berdasarkan kesepakatan tim pemeriksa, dari hasil pengujian substantif atas proses perencanaan dapat disimpulkan permasalahan lainnya sebagai berikut:

Berdasarkan konfirmasi ke Dinas PMD Kabupaten Simulasi, keterlambatan penerbitan rincian alokasi pagu indikatif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikarenakan ketidaklengkapan data yang diperlukan dalam proses perhitungan pagu indikatif. Dalam lingkup desa, hal ini menyebabkan penyusunan RKPDes Pemerintah Desa Cijulang tidak memperhatikan pagu indikatif tersebut yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan APBDes yang disusun tidak berdasarkan pertimbangan dan perencanaan yang baik

### **PELATIHAN 4.2**

### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DESA

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas penatausahaan pendapatan desa pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes. Penjelasan:

Pengujian substantif atas proses perencanaan terdiri dari tiga kertas kerja yaitu Kertas Kerja Penerimaan Tunai, Kertas Kerja Penerimaan Transfer dan Kertas Kerja Anggaran & Realisasi Pendapatan.

# Latihan 4.2.1 - Uji Substantif Penerimaan Tunai

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas penerimaan tunai.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pendapatan –
   Tab Penerimaan Tunai
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk mendokumentasikan pengujian apakah penatausahaan pendapatan tunai telah dibukukan dalam penatausahaan keuangan desa dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - Klik tombol Load untuk memunculkan data penerimaan tunai di desa.
     Berdasarkan data pada Aplikasi Siswaskeudes, tidak ada penerimaan tunai pada Desa Cijulang.
  - 2) Auditor melakukan konfirmasi untuk membuktikan kebenaran data tersebut.
  - 3) Tuangkan dalam kesimpulan.

# **Latihan 4.2.2 - Uji Substantif Proses Penerimaan Transfer**

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas penerimaan transfer.

# Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pendapatan –
   Tab Penerimaan Transfer
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk mendokumentasikan pengujian atas penatausahaan pendapatan transfer melalui bank telah dibukukan dalam penatausahaan keuangan desa dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Load untuk memunculkan data penerimaan transfer.
  - 2) Atas transaksi tersebut, auditor melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran data penerimaan. Untuk masing-masing transaksi, klik tombol Verifikasi untuk menginput hasil verifikasi :

Tabel 4.3

Data Hasil Verifikasi Data Penerimaan

No	Tanggal Masuk RKD	Uraian Penerimaan uang	Penataus	Validasi Auditor (V)	
	KKD		Tanggal	Nilai	
1	21/02/2020	Bantuan Keuangan Kabupaten	21/02/2020	9,987,400.00	V
2	18/03/2020	Dana Desa Tahap 1	18/03/2020	264,153,400.00	V
3	18/03/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan	18/03/2020	50,900,000.00	V

Tanggal No Masuk RKD		Uraian Penerimaan uang	Penataus	Penatausahaan di BKU		
	KKD		Tanggal	Nilai		
		BPD Bulan Januari dan Februari				
4	08/04/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Maret	08/04/2020	25,450,000.00	V	
5	09/04/2020	Alokasi Dana Desa Tahap I	09/04/2020	90,319,480.00	V	
6	09/04/2020	DBH Pajak Non-PBB dan Retribusi Daerah Tahap I	09/04/2020	32,358,920.00	V	
7	08/05/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan April	08/05/2020	25,450,000.00	V	
8	17/05/2020	Dana Desa Tahap II	17/05/2020	528,306,800.00	V	
9	12/06/2020	Penghasilan Tetap 12/06/2020 25,450 Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Mei		25,450,000.00	V	
10	04/07/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Juni	04/07/2020	25,450,000.00	V	
11	25/07/2020	Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Pilkades	25/07/2020	42,293,375.00	V	
12	08/08/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Juli	08/08/2020	25,450,000.00	V	
13	12/08/2020	Alokasi Dana Desa 12/08/2020 90,319,480.00 Tahap II		V		
14	12/08/2020	DBH Pajak Non-PBB dan Retribusi Daerah Tahap II 32,358,920.00		V		
15	19/08/2020	Bantuan Keuangan 19/08/2020 127,288,000.00 Pemerintah Provinsi		V		
16	28/08/2020	Dana Desa Tahap III 28/08/2020 528,306,800.00		528,306,800.00	V	
17	05/09/2020	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Agustus	05/09/2020	25,450,000.00	V	

- 3) Bukti dukung atas jawaban tersebut didokumentasikan dengan tertib dan rapi;
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas penerimaan transfer.

Disusun oleh : Olla Rahman Tanggal: 16 Januari 2021

Pencatatan transaksi penerimaan transfer telah sesuai seluruhnya dengan bukti rekening koran atas Rekening Kas Desa

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 20 Januari 2021.

# Latihan 4.2.3 - Uji Substantif Atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas anggaran dan realisasi pendapatan.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pendapatan –
   Tab Anggaran dan Realisasi Pendapatan
- Penjelasan:
  - Sub menu ini digunakan untuk membandingkan anggaran dan realisasi pendapatan yang telah dibukukan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Langkah Penginputan:
  - Klik tombol Load untuk memunculkan data anggaran dan realisasi pendapatan pada APBDes awal. Untuk melihat data anggaran dan realisasi penerimaan pada APBDes Perubahan, tandai pilihan APBDes-P terlebih dahulu kemudian klik tombol Load.
  - 2) Analisis data anggaran dan realisasi penerimaan untuk setiap sumber dana.

Tabel 4.4

Analisis Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan

No.	Jenis Pendapatan	Jenis Pendapatan Anggaran (Rupiah)		%
1	4.2.1.01. Dana Desa	1,320,767,000.00	1,320,767,000.00	100.00
2	4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	101,906,795.00	64,717,840.00	63.51
3	4.2.3.01. Alokasi Dana Desa	531,198,700.00	384,238,960.00	72.33
4	4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	127,288,000.00	127,288,000.00	100.00
5	4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	93,930,775.00	52,280,775.00	55.66
6	4.3.6.01. Bunga Bank	0.00	631,231.00	0.00
		2,175,091,270.00	1,949,923,806.00	89.65

<sup>3)</sup> Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan.

Disusun oleh : Olla Rahman Tanggal: 15 Januari 2021

Atas hasil analisis, dapat disimpulkan terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan di Desa Cijulang

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 20 Januari 2021.

# Latihan 4.2.4 - Kesimpulan dari Uji Substantif Pendapatan

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

# Langkah Kerja

• Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci – Uji Substantif – Pendapatan

# • Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan dan/atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas penatausahaan pendapatan desa.

### • Langkah Penginputan:

# 1. Kesimpulan Utama

Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 20 Januari 2021

Atas hasil analisis data pendapatan desa, tidak ditemukan permasalahan terkait pencatatan pendapatan desa

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 2 Februari 2021.

### 2. Temuan

Tidak ada temuan dari kegiatan ini.

# 3. Permasalahan lainnya

Tidak ditemukan permasalahan lainnya dari kegiatan ini.

### **PELATIHAN 4.3**

### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PENATAUSAHAAN BELANJA

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas penatausahaan belanja desa pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

### Penjelasan:

Pengujian substantif atas penatausahaan belanja terdiri dari tiga kertas kerja yaitu Kertas Kerja Belanja dengan SPP, Kertas Kerja Non-SPP dan Kertas Kerja Aliran Kas.

# Latihan 4.3.1 - Uji Substantif Atas Belanja Dengan SPP

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian sampel atas belanja yang menggunakan SPP.

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Belanja tab
   Sampel Bukti
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan uji formil dan materiil atas belanja yang menggunakan SPP.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Load untuk memunculkan nomor bukti belanja.
  - 2) Pilih kuitansi atau bukti pengeluaran untuk diuji petik sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Kuitansi untuk Uji Petik

No.	Nomor Bukti	Tanggal	Uraian	Penerima	Nilai (Rp)
1	00239/KWT/08.2009/2020	12-Jun-20	Bahan Baku/ Material	CV. RATU BILQIES	39.700.000
2	00247/KWT/08.2009/2020	12-Jun-20	Bahan Baku/ Material	CV. RATU BILQIES	39.700.000
3	00254/KWT/08.2009/2020	12-Jun-20	Upah tukang dan Pekerja	HARUN SUHERLAN	43.380.000
4	00255/KWT/08.2009/2020	12-Jun-20	Bahan Baku/ Material	CV. RATU BILQIES	92.050.000
5	00264/KWT/08.2009/2020	25-Jun-20	Pengadaan Mobil Ambulance	HARUN SUHERLAN	160.000.000
6	00373/KWT/08.2009/2020	30-Aug-20	Bahan Baku/Material	HARUN SUHERLAN	74.050.000
7	00394/KWT/08.2009/2020	2-Sep-20	Bahan Baku/ Material	HARUN SUHERLAN	50.000.000
8	00402/KWT/08.2009/2020	2-Sep-20	Bahan Baku/ Material	HARUN SUHERLAN	50.000.000

No.	Nomor Bukti	Tanggal	Uraian	Penerima	Nilai (Rp)
9	00418/KWT/08.2009/2020	6-Sep-20	Bahan Baku/ Material	HARUN SUHERLAN	50.000.000
10	00426/KWT/08.2009/2020	6-Sep-20	Bahan Baku/ Material	HARUN SUHERLAN	69.150.000
				JUMLAH	668.030.000

- 3) Klik tombol Verifikasi untuk menginput hasil pengujian formil dan materiil yang telah dilaksanakan pada setiap kegiatan yang diuji petik. Berikut ini adalah data hasil pengujian.
  - a) Hasil pengujian formil
    - (1) Bukti dukung untuk kuitansi nomor 00239/KWT/08.2009/2020 tidak dilengkapi tanda tangan penerima pembayaran;
    - (2) Pada bukti dukung untuk kuitansi nomor 00247/KWT/08.2009/2020 terdapat kesalahan tulis jumlah pembayaran dalam huruf yang seharusnya "tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah" tertulis "tiga puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah";
    - (3) Kuitansi 00394/KWT/08.2009/2020 senilai Rp50.000.000,00 belum dilengkapi dengan meterai Rp6000,00
  - b) Hasil pengujian materiil
    - (1) Bukti dukung kuitansi nomor 00426/KWT/08.2009/2020 hanya berjumlah total Rp69.000.000,00 sedangkan 1 lembar bukti dukung senilai Rp150.000,00 tidak ditemukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktertiban dalam penyimpanan dokumen bukti pembelian;
    - (2) Bukti dukung atas kuitansi 00402/KWT/08.2009/2020 tidak mencantumkan tanggal pembelian.
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas belanja dengan SPP.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 17 Januari 2021

Dari 10 belanja yang diuji petik, terdapat 3 bukti belanja yang tidak memenuhi kelengkapan formil dan 2 bukti belanja yang tidak memenuhi kelengkapan materiil

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 20 Januari 2021.

# Latihan 4.3.2 - Uji Substantif Atas Belanja tidak menggunakan SPP

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas belanja yang tidak menggunakan SPP .

### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Belanja Tab Non-SPP
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian atas pengeluaran belanja yang tidak menggunakan SPP.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik Tambah untuk menginput transaksi belanja yang dilakukan tanpa mekanisme SPP.
  - 2) Dari hasil pengujian oleh auditor diperoleh data transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Atas Belanja tidak menggunakan SPP

No.	Tanggal	Uraian Pengeluaran	Cara Pembayaran	Nilai (Rp)	Verifikasi Auditor
1	08/05/2020	Pengambilan uang untuk kepentingan pribadi Kades	Bank	2.000.000	Pembayaran uang tidak dilakukan melalui mekanisme SPP dan Pengeluaran yang tidak sah.
				2.000.000	

 Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas belanja Non-SPP.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 20 Januari 2021

Terdapat transaksi yang dilakukan tanpa mekanisme pengajuan SPP yaitu terkait pengambilan uang untuk kepentingan pribadi Kades. Hal tersebut merupakan pengeluaran yang tidak sah, dikarenakan tidak ada dalam anggaran. Akibatnya terdapat perbedaan saldo antar Buku Kas Umum dengan Kas Fisik (Bank + Tunai).

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 22 Januari 2021

### Latihan 4.3.3 - Uji Substantif Atas Aliran Kas Tunai dan Bank

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas aliran kas tunai dan Bank.

# Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Belanja Tab
   Aliran Kas
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk menguji saldo akhir kas melalui pemeriksaan aliran kas tunai dan bank.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik tombol Tambah untuk input hasil *cash opname* per tanggal pemeriksaan sebagai berikut:
    - a) Kas Tunai

Menurut catatan, saldo kas tunai pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp782.482,00. Pada tanggal 2 Januari 2021, terdapat pengembalian sisa panjar sebesar Rp50.000,00 dari TPK. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2021, Kaur Keuangan menyetorkan seluruh kas tunai ke RKD senilai Rp832.500,00 (berdasarkan bukti setor bank). Pada saat *cash* opname tanggal 10 Januari 2021, tidak terdapat kas tunai di tangan Kaur Keuangan.

- b) Kas Bank
  - Saldo RKD pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai rekening koran adalah sebesar Rp20.403.527,00. Pada tanggal 10 Januari 2021 terdapat setoran tunai sebesar Rp832.500,00. Saldo RKD pada 10 Januari 2021 adalah Rp21.236.027,00.
- 2) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas aliran kas tunai dan bank.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 20 Januari 2021

Pencatatan aliran kas tunai dan bank telah sesuai dengan hasil cash opname

Kesimpulan tersebut kemudian direviu oleh Aldo Swastika pada 20 Januari 2021.

# Latihan 4.3.4 - Kesimpulan dari Uji Substantif Belanja Desa

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

### <u>Langkah Kerja</u>

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Belanja Tab
   KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama serta temuan dan/atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas penatausahaan belanja desa.

Langkah Penginputan:

# 1. Kesimpulan Utama

- 1) Masuk pada Kertas Kerja Utama
- 2) Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 23 Januari 2021

Dari 10 bukti transaksi belanja yang diuji petik untuk verifikasi kelengkapan bukti belanja, ditemukan permasalahan kelengkapan formil dan materiil. Sedangkan dari hasil *cash opname*, tidak ditemukan permasalahan aliran kas tunai dan bank

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 2 Februari 2021.

# 2. Temuan

- 1) Klik tombol "temuan" untuk menginput temuan.
- 2) Berdasarkan kesepakatan tim pemeriksa, dari hasil pengujian substantif atas penatausahaan belanja dapat dirumuskan temuan sebagai berikut:

:	0810 (Kelemahan administrasi keuangan)			
:	Bukti belanja sebagai bukti dukung kuitansi 00426/KWT/08.2009/2020 tidak ditemukan			
:	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa			
:	Rp150.000,00			
:	0510 (Kelemahan lain pencatatan atau pelaporan)			
:	penyimpanan bukti dukung belanja tidak tertib sehingga terdapat dokumen yang hilang.			
:	Potensi kerugian pada keuangan desa.			
:	0110 (Tuntutan ganti rugi dan penyetoran ganti rugi ke Kas Desa)			
:	Penyetoran kembali belanja yang tidak didukung bukti belanja.			
:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.			
	: :			

## 3. Permasalahan lainnya

- 1) Klik tombol "lainnya" untuk menginput permasalahan lainnya.
- 2) Berdasarkan kesepakatan tim pemeriksa, dari hasil pengujian substantif atas proses perencanaan dapat disimpulkan permasalahan lainnya sebagai berikut:

Pemberian	pemahaman	kepada	Pemerintah	Desa	Cijulang	mengenai	kelengkapan
formil dan	materiil yang	harus di <sub>l</sub>	penuhi dalam	ı bukti	belanja.		

#### **PELATIHAN 4.4**

#### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif pengeluaran pembiayaan desa pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

#### Penjelasan:

Pengujian substantif atas proses perencanaan terdiri dari dua kertas kerja yaitu Kertas Kerja Pembiayaan dan Kertas Kerja Penyertaan Modal Aset.

#### Latihan 4.4.1 - Uji Substantif Atas Pengeluaran Pembiayaan

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas pengeluaran pembiayaan.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pembiayaan –
   Tab KKD SPP Penerimaan
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk Untuk memastikan bahwa semua pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan SPP (uang) telah ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - Klik tombol Load untuk memunculkan data SPP pembiayaan desa.
     Berdasarkan data pada Aplikasi Siswaskeudes, transaksi terkait pengeluaran pembiayaan pada Desa Cijulang untuk tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00 yang digunakan untuk BUM Des Mitra Mandiri.
  - 2) Auditor melakukan pengujian terhadap pengeluaran pembiayaan tersebut dari aspek dasar hukum, rencana usaha, bukti perikatan, dan studi kelayakan.
  - Buat kesimpulan dalam kolom Catatan Auditor.

## Latihan 4.4.2 - Uji Substantif Atas Penyertaan Modal Aset

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas Penyertaan Modal Aset desa Cijulang.

#### Langkah Kerja

Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci – Uji Substantif – Pembiayaan –
 Tab KKD Penyertaan Modal Aset

## • Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk memastikan bahwa semua penyertaan modal aset desa telah ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Langkah Penginputan:
  - Untuk Desa Cijulang, transaksi terkait penyertaan modal aset pada Desa Cijulang untuk tahun 2020 berupa kendaraan roda 4 senilai Rp150.000.000,00 untuk dikelola oleh BUM Desa Mitra.
  - 2) Auditor melakukan pengujian terhadap pengeluaran pembiayaan tersebut dari aspek dasar hukum, rencana usaha, bukti perikatan, dan studi kelayakan.
  - 3) Buat kesimpulan dalam kolom Catatan Auditor.

#### Latihan 4.4.3 - Kesimpulan dari Uji Substantif Pengeluaran Pembiayaan

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pembiayaan –
   Tab KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini digunakan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan dan/atau permasalahan lainnya atas pengujian substantif pada pengeluaran pembiayaan.

• Langkah Penginputan:

#### 1. Kesimpulan Utama

1) Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 20 Januari 2021

Berdasarkan pengujian pengeluaran pembiayaan dan penyertaan modal aset pada desa Cijulang terdapat permasalahan bahwa penyertaan modal BUM Des Mitra Mandiri tidak dilengkapi dengan studi kelayakan.

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 2 Februari 2021.

#### 2. Temuan

Ditemukan permasalahan terkait studi kelayakan pendirian BUM Des Mitra Mandiri.

Kode temuan	:	0304 (Masalah Pengelolaan BUMDesa/Kerjasama antar Desa)			
Uraian	:	Terdapat permasalahan penyertaan modal BUM Des Mitra Mandiri yang tidak dilengkapi studi kelayakan.			
Kriteria	:	PERMENDES tentan BUM Des.			
Nilai	:	Rp250.000.000,00			
Penyebab					
Kode Penyebab	:	0509 (Pelaporan yang diperlukan tidak ada)			
Uraian	:	Tidak adanya laporan Studi kelayakan BUM DES Mitra Mandiri.			
Akibat	:	Potensi kerugian pada keuangan desa.			
Kode Saran	:	0104 (Penyetoran kembali uang ke Kas Daerah)			
Uraian	:	Penyetoran kembali uang yang telah dikeluarkan ke Kas Daerah.			
Tanggapan	•	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.			

## 3. Permasalahan lainnya

Tidak ditemukan permasalahan lainnya dari kegiatan ini.

#### **PELATIHAN 4.5**

#### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

### Penjelasan:

Pengujian substantif atas PBJ desa terdiri dari dua kertas kerja yaitu Kertas Kerja Uji Swakelola dan Kertas Kerja Uji Pihak Ketiga.

#### Latihan 4.5.1 - Uji Substantif Atas PBJ Swakelola

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian transaksi-transaksi terkait pengadaan barang dan jasa secara swakelola.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif PBJ Desa Tab
   Uji Swakelola
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian transaksi-transaksi yang bersifat swakelola.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Klik Load untuk memunculkan seluruh data PBJ yang ada di desa.
  - 2) Pilih kegiatan PBJ yang akan diuji petik sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Kegiatan PBJ untuk Uji Petik

No.	Kode Keg.	ID Paket	Sumber Dana	Nama Paket	Anggaran	Realisasi	%
1	02.03.10.	01	PBP	Pengaspalan Jalan Ciasih (457 x 2 M)	95.388.000	95.388.000	100
2	02.03.10.	03	DDS	Pengaspalan Jalan Tanjakan Cibuyung (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100
3	02.03.10.	04	DDS	Pengaspalan Jalan Turunan Cibuyung (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100
4	02.03.10.	05	DDS	Pengaspalan Jalan Tanjakan Cimadang (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100

No.	Kode Keg.	ID Paket	Sumber Dana Nama Paket		Anggaran	Realisasi	%
5	02.03.10.	06	DDS	Pengaspalan Jalan Turunan Cimadang (350 x2 M)	103.574.000	103.574.000	100
6	02.03.10.	09	DDS	Pengaspalan Jalan Pasir Laya (150 x 2 M)	47.266.000	47.266.000	100
7	02.03.11.	02	DDS	Pengaspalan Jalan Kp. Cibogo RT.023 RW.007 (200 x 2 M)	60.519.017	60.519.000	100
8	02.03.11.	03	DDS	Pengaspalan Jalan Kp. Cicupak RT.036 RW.011 (200 x 2 M)	60.518.000	60.518.000	100
9	02.03.11.	04	DDS	Pengaspalan Jalan Kp. Ciherang RT.039 RW.011 (450 x 2 M)	140.314.000	140.314.000	100
			JUMLAH		734.139.017	734.139.017	100

- Klik sub menu Sample Paket untuk melihat paket kegiatan yang telah dipilih sebagai sampel.
  - Pengujian atas setiap sampel kegiatan dilakukan dengan cara memilih/mengklik paket kegiatan kemudian klik sub menu Uji Sample untuk melihat daftar pertanyaan verifikasi.
- 4) Input jawaban pertanyaan verifikasi untuk setiap paket kegiatan. Untuk pertanyaan verifikasi dengan jawaban Ya maka perlu di-klik pada kotak di samping pertanyaan hingga muncul tanda "√". Hasil pengujian atas paket sampel adalah sebagai berikut:
  - a. Pada kegiatan Pengaspalan Jalan Ciasih (457 x 2 M), Pemerintah Desa Cijulang tidak dapat memberikan SK Penetapan TPK karena dokumen tersebut hilang. Selama pekerjaan berlangsung, TPK tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan secara tepat waktu dan Pemerintah Desa Cijulang mencairkan pembayaran termin berdasarkan observasi kemajuan pekerjaan secara langsung. Laporan kemajuan pekerjaan baru disusun secara sekaligus pada akhir kegiatan.
  - b. Pada RAB kegiatan Pengaspalan Jalan Tanjakan Cibuyung (250 x 2 M) terdapat kesalahan hasil perhitungan volume yang meskipun tidak berpengaruh terhadap biaya pekerjaan, namun menyebabkan kesalahan penyajian informasi. Selain itu, TPK tidak menyusun laporan kemajuan

- pekerjaan secara tertib dan tepat waktu sehingga pembayaran termin pekerjaan hanya didasarkan pada foto dokumentasi pekerjaan atau observasi secara langsung. Laporan kemajuan pekerjaan baru diselesaikan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai.
- c. Pada kegiatan Pengaspalan Jalan Turunan Cibuyung (250 x 2 M) tidak ditemukan permasalahan PBJ.
- d. Pembayaran termin kegiatan Pengaspalan Jalan Tanjakan Cimadang (250 x 2 M) tidak didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan karena laporan tersebut baru disusun secara sekaligus ketika pekerjaan telah selesai. Selain itu, sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan, BAST atas pekerjaan belum disusun.
- e. TPK kegiatan Pengaspalan Jalan Turunan Cimadang (350 x2 M) belum menyusun BAST meskipun pekerjaan telah selesai 100%.
- f. Kegiatan Pengaspalan Jalan Pasir Laya (150 x 2 M) tidak tercantum sebagai kegiatan prioritas dalam Berita Acara Musyawarah Desa namun tetap dilaksanakan karena ketersediaan dana. RAB atas kegiatan tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa karena kelalaian Pemerintah Desa dan TPK.
- g. TPK kegiatan Pengaspalan Jalan Kp. Cibogo RT.023 RW.007 (200 x 2 M) tidak menyusun laporan kemajuan pekerjaan secara tertib dan tepat waktu sehingga pembayaran termin pekerjaan tidak didasarkan pada laporan tersebut.
- h. Kegiatan Pengaspalan Jalan Kp. Cicupak RT.036 RW.011 (200 x 2 M) tidak termasuk sebagai kegiatan prioritas dalam Berita Acara Musyawarah Desa namun tetap dilaksanakan karena ketersediaan dana.
- i. Dari hasil cek fisik ditemukan permasalahan PBJ pada kegiatan Pengaspalan Jalan Kp. Ciherang RT.039 RW.011 (450 x 2 M) berupa kekurangan lebar jalan aspal senilai Rp18.400.000,00.
- 5) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas kegiatan swakelola.

Disusun oleh : Olla Rahman Tanggal: 20 Januari 2021

Dari 9 kegiatan swakelola yang diuji petik, terdapat 8 kegiatan yang tidak memenuhi kriteria pengadaan barang/jasa seperti terkait kelengkapan administratif dan pemenuhan prosedur pembayaran

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 22 Januari 2021.

#### Latihan 4.5.2 – Uji Subtantif PBJ melalui pihak ketiga

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas transaksi yang terkait pihak ketiga.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif PBJ Desa Tab
   KKD Uji Pihak Ketiga
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian atas paket-paket pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga (kontraktor).

- Langkah Penginputan:
  - Klik Load untuk memunculkan data kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
  - 2) Dalam hal ini, Desa Cijulang tidak memiliki kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga.
  - 3) Tuangkan dalam kesimpulan.

## Latihan 4.5.3 – Kesimpulan Uji Subtantif PBJ

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

## Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif PBJ Desa KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama serta temuan dan/atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas PBJ desa.

Langkah Penginputan:

## 1. Kesimpulan Utama

Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

#### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 23 Januari 2021

Dari 9 kegiatan yang diuji petik, terdapat 8 kegiatan yang tidak memenuhi kriteria PBJ secara keseluruhan

Kesimpulan tersebut direviu oleh Muhammad Syukur pada 2 Februari 2021.

#### 2. Temuan

- 1) Klik tombol "temuan" untuk menginput temuan.
- 2) Berdasarkan kesepakatan tim pemeriksa, dari hasil pengujian substantif atas PBJ desa dapat dirumuskan temuan sebagai berikut:

#### **Temuan Pertama**

Kode temuan	:	0810 (Kelemahan administrasi keuangan)				
Uraian	:	Pengaspalan Jalan Tanjakan Cimadang dan Pengaspalan Jalan Kp. Cibogo RT.023 RW.007, Pemerintah Desa melakukan pembayaran per termin hanya berdasarkan foto dan observasi				
Kriteria	:	Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018				
Penyebab 1						
Kode Penyebab	:	0104 (Kelalaian pejabat yang berwenang)				
Uraian	:	Pemerintah Desa Cijulang tidak memerintahkan TPK menyusun laporan progres pekerjaan sebelum mencairkan dana per termin.				
Akibat	:	Potensi kerugian keuangan desa				

Kode Saran	:	0110 (Tuntutan ganti rugi dan penyetoran ganti rugi ke Kas Desa)			
Uraian	:	Penyetoran kembali belanja yang tidak didukung bukti belanja.			
Tanggapan	:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.			
Penyebab 2					
Kode Penyebab	:	0509 (Pelaporan yang diperlukan tidak ada)			
Uraian	:	TPK tidak menyusun laporan progres pekerjaan per termin secara memadai.			
Akibat	:	Pembayaran atas pekerjaan tidak sah			
Kode Saran	:	0606 (Peningkatan mutu personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang jasa)			
Uraian	:	Pemberian pemahaman kepada perangkat desa dan TPK mengenai kelengkapan administratif keuangan yang harus dipenuhi sebagai dasar pencairan dana			
Tanggapan	:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.			

## **Temuan Kedua**

Kode temuan	:	0810 (Kelemahan administrasi keuangan)
Uraian	:	Pada kegiatan Pengaspalan Jalan Ciasih, dokumen SK penetapan TPK hilang. Pada kegiatan Pengaspalan Jalan Tanjakan Cimadang, BAST hasil pekerjaan belum dibuat
Kriteria	:	Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018
Penyebab 1		
Kode Penyebab	:	0104 (Kelalaian pejabat yang berwenang)
Uraian	:	Penyimpanan dokumen kurang memadai. Dan Pemerintah Desa tidak memerintahkan TPK untuk segera menyusun BAST hasil pekerjaan.
Akibat	:	Pihak yang bertanggungjawab tidak dapat diidentifikasi jika terjadi kendala pada kegiatan dan tidak dapat diyakini kesesuaian hasil pekerjaan dengan realisasi pembayaran.
Kode Saran 1	:	0703 (Penyempumaan unsur-unsur sistem pengendalian)
Uraian	:	Penyetoran kembali belanja yang tidak didukung bukti belanja.
Tanggapan	:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.
Kode Saran 2	:	0603 (Penyempurnaan prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa)
Uraian	:	Pemerintah Desa Cijulang harus memahami bahwa BAST hasil pekerjaan harus disusun sebagai dokumen formal penyelesaian pekerjaan.
Tanggapan	:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa.

## Temuan Ketiga

Penyebab		
Kriteria	:	Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018
Uraian	:	Pada kegiatan Pengaspalan Jalan Kp. Ciherang RT.039 RW.011, Terdapat kekurangan volume pengaspalan dengan nilai Rp18.400.000,00
Kode temuan	:	0107 (Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan atas barang/jasa yang tidak sesuai kontrak)

Kode Penyebab : 0104 (Kelalaian pejabat yang berwenang)

Uraian : Kelalaian Kaur dalam mengendalikan

pelaksanaan pekerjaan.

Akibat : Terjadi kelebihan pembayaran sebesar

Rp18.400.000,00

Kode Saran : 0603 (Penyempurnaan prosedur pelaksanaan

pengadaan barang jasa)

Urajan : Menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp18.400.000,00 ke kas Desa.

Tanggapan : Kepala Desa Cijulang sependapat dengan

temuan tim pemeriksa.

## 3. Permasalahan lainnya

1) Klik tombol "lainnya" untuk menginput permasalahan lainnya.

2) Berdasarkan kesepakatan tim pemeriksa, dari hasil pengujian substantif atas PBJ Desa dapat disimpulkan permasalahan lainnya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengaspalan Jalan Pasir Laya dan Pengaspalan Jalan Kp. Cicupak RT.036 RW.011 tidak termasuk dalam kegiatan prioritas desa yang tertuang dalam BA Musdes namun masuk ke dalam RKPDes dan APBDes karena terdapat ketersediaan dana.
- Terdapat kekeliruan dalam perhitungan RAB namun tidak mempengaruhi volume pekerjaan maupun pembayaran. Hal ini disebabkan oleh ketidaktelitian TPK dan perangkat desa

## **PELATIHAN 4.6**

#### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas kewajiban perpajakan pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

Penjelasan:

Pengujian substantif atas PBJ desa terdiri dari tujuh kertas kerja dukungan yaitu Kertas Kerja PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh lainnya, Pajak Restoran dan Pajak Galian C serta kertas kerja utama.

#### Latihan 4.6.1 - Uji Subtantif Kewajiban Perpajakan

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian atas transaksi-transaksi perpajakan pada Desa Cijulang.

## Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Perpajakan
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian transaksi-transaksi terkait perpajakan.

- Langkah Penginputan:
  - Pilih sub menu jenis pajak yang akan diuji kemudian klik Load. Setelah muncul data perpajakannya, pilih transaksi perpajakan yang akan diuji kemudian klik tombol Verifikasi.
  - 2) Dalam contoh ini, akan dilakukan pengujian atas PPN dan PPh pasal 22 dengan uraian sebagai berikut:
    - a. Pengujian PPN
      - (1) Pilih sampel transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.8

Data Sampel Transaksi untuk Pengujian PPN

No.	Kd_Keg	Nomor SPP/SPJ	Nomor Bukti/Kuitansi	Nilai	Keterangan
1	02.02.04.	0083/SPP/08.2 009/2020	00264/KWT/08.2009/2020	160.000.000	Pengadaan Mobil Ambulance
2	02.03.10.	0128/SPP/08.2 009/2020	00373/KWT/08.2009/2020	74.050.000	Bahan Baku/Material
3	02.03.10.	0136/SPP/08.2 009/2020	00394/KWT/08.2009/2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material
4	02.03.10.	0137/SPP/08.2 009/2020	00402/KWT/08.2009/2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material
5	02.03.10.	0144/SPP/08.2 009/2020	00418/KWT/08.2009/2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material
6	02.03.10.	0145/SPP/08.2 009/2020	00426/KWT/08.2009/2020	69.150.000	Bahan Baku/ Material
7	02.03.11.	0009/SPP/08.2 009/2020	00051/KWT/08.2009/2020	34.250.000	Batu Pecah

No.	Kd_Keg	Nomor SPP/SPJ	Nomor Bukti/Kuitansi	Nilai	Keterangan
8	02.03.11.	0077/SPP/08.2 009/2020	00239/KWT/08.2009/2020	39.700.000	Bahan Baku/Material
9	02.03.11.	0078/SPP/08.2 009/2020	00247/KWT/08.2009/2020	39.700.000	Bahan Baku/Material
10	02.03.11.	0079/SPP/08.2 009/2020	00255/KWT/08.2009/2020	92.050.000	Bahan Baku/ Material
	JUMLAH			658.900.000	

(2) Kegiatan yang diuji petik tersebut memiliki laporan rincian pemotongan dan penyetoran PPN sebagai berikut:

Tabel 4.9

Data Rincian Pemotongan dan Penyetoran PPN

DATA SISKEUDES						S	
No.	Kd_Keg	Nilai	РЕМОТО	ONGAN	PENYE	SALDO	
			Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	SALDO
1	02.02.04.	160.000.000	25-Jun-20	14.545.454	25-Jun-20	14.545.454	-
2	02.03.10.	74.050.000	30-Aug-20	6.731.818	2-Sep-20	6.731.818	-
3	02.03.10.	50.000.000	2-Sep-20	4.545.454	2-Sep-20	4.545.454	-
4	02.03.10.	50.000.000	2-Sep-20	4.545.454	2-Sep-20	4.545.454	-
5	02.03.10.	50.000.000	6-Sep-20	4.545.454	6-Sep-20	4.545.454	-
6	02.03.10.	69.150.000	6-Sep-20	6.286.364	6-Sep-20	6.286.364	-
7	02.03.11.	34.250.000	21-Mar-20	3.113.636	21-Mar-20	3.113.636	-
8	02.03.11.	39.700.000	12-Jun-20	3.609.091	12-Jun-20	3.609.091	-
9	02.03.11.	39.700.000	12-Jun-20	3.609.091	12-Jun-20	3.609.091	-
10	02.03.11.	92.050.000	12-Jun-20	8.368.182	12-Jun-20	8.368.182	-
	JUMLAH	658.900.000		59.899.998		59.899.998	-

- (3) Hasil verifikasi pemotongan dan penyetoran PPN atas kegiatan yang diuji petik adalah sebagai berikut:
  - (a) Pada kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance dengan kode kegiatan 02.02.04 senilai Rp160.000.000,00, Pemerintah Desa Cijulang memotong PPN sebesar Rp14.545.454,00 dan melaporkan telah menyetorkan seluruh PPN yang dipotong. Namun dari hasil verifikasi terhadap bukti setor, diketahui bahwa PPN yang

- disetorkan adalah sebesar Rp14.454.545,00 atau kurang setor Rp90.909,00. Hal ini disebabkan kekurangtelitian saat mengisi jumlah PPN yang disetor.
- (b) Tidak ditemukan permasalahan lainnya atas pemotongan dan penyetoran PPN.
- (4) Setelah seluruh transaksi diverifikasi, input kesimpulan pengujian dengan meng-klik tombol Kesimpulan.

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 16 Januari 2021

Dari 10 kegiatan yang diuji petik, terdapat kekurangan setor PPN sebesar Rp90.909,00 untuk satu kegiatan yaitu pengadaan mobil ambulance

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 22 Januari 2021.

- b. Pengujian PPh pasal 22
  - (1) Pilih sampel transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.10

Data Sampel Transaksi untuk Pengujian PPh Pasal 22

No.	Kd_Keg	Nomor SPP/SPJ	Nomor Bukti/Kuitansi	Nilai	Keterangan
1	02.02.04.	0083/SPP/08.2009 /2020	00264/KWT/08.2009/ 2020	160.000.000	Pengadaan Mobil Ambulance
2	02.03.10.	0128/SPP/08.2009 /2020	00373/KWT/08.2009/ 2020	74.050.000	Bahan Baku/Material
3	02.03.10.	0136/SPP/08.2009 /2020	00394/KWT/08.2009/ 2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material
4	02.03.10.	0137/SPP/08.2009 /2020	00402/KWT/08.2009/ 2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material
5	02.03.10.	0144/SPP/08.2009 /2020	00418/KWT/08.2009/ 2020	50.000.000	Bahan Baku/ Material

No.	Kd_Keg	Nomor SPP/SPJ	Nomor Bukti/Kuitansi	Nilai	Keterangan
6	02.03.10.	0145/SPP/08.2009 /2020	00426/KWT/08.2009/ 2020	69.150.000	Bahan Baku/ Material
7	02.03.11.	0009/SPP/08.2009 /2020	00051/KWT/08.2009/ 2020	34.250.000	Batu Pecah
8	02.03.11.	0077/SPP/08.2009 /2020	00239/KWT/08.2009/ 2020	39.700.000	Bahan Baku/Material
9	02.03.11.	0078/SPP/08.2009 /2020	00247/KWT/08.2009/ 2020	39.700.000	Bahan Baku/Material
10	02.03.11.	0079/SPP/08.2009 /2020	00255/KWT/08.2009/ 2020	92.050.000	Bahan Baku/ Material
	JUMLAH	•	•	658.900.000	

(2) Kegiatan yang diuji petik tersebut memiliki laporan rincian pemotongan dan penyetoran PPh 22 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Data Rincian Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22

			DATA SISKEUDES				
No. Kd_Keg		Nilai	PEMOTONGAN		PENYET	SALDO	
			Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	
1	02.02.04.	160.000.000	25-Jun-20	2.181.818	25-Jun-20	2.181.818	-
2	02.03.10.	74.050.000	30-Aug-20	1.009.773	2-Sep-20	1.009.773	-
3	02.03.10.	50.000.000	2-Sep-20	681.818	2-Sep-20	681.818	-
4	02.03.10.	50.000.000	2-Sep-20	681.818	2-Sep-20	681.818	-
5	02.03.10.	50.000.000	6-Sep-20	681.818	6-Sep-20	681.818	-
6	02.03.10.	69.150.000	6-Sep-20	942.955	6-Sep-20	942.955	-
7	02.03.11.	34.250.000	21-Mar-20	467.045	21-Mar-20	467.045	-
8	02.03.11.	39.700.000	12-Jun-20	541.364	12-Jun-20	541.364	-
9	02.03.11.	39.700.000	12-Jun-20	541.364	12-Jun-20	541.364	-
10	02.03.11.	92.050.000	12-Jun-20	1.255.227	12-Jun-20	1.255.227	-
	JUMLAH	658.900.000		8.985.000		8.985.000	-

- (3) Hasil verifikasi pemotongan dan penyetoran PPh 22 atas kegiatan yang diuji petik adalah sebagai berikut:
  - (a) Pada kegiatan belanja Bahan Baku/Material dengan kode kegiatan02.03.10 tanggal 6 September 2019 senilai Rp50.000.000,00,Pemerintah Desa Cijulang memotong PPh 22 sebesar

Rp681.818,00 dan melaporkan telah menyetorkan seluruh PPh 22 yang dipotong. Namun dari hasil verifikasi terhadap bukti setor, diketahui bahwa PPh 22 atas kegiatan tersebut belum disetorkan. Hal ini disebabkan kelalaian Pemerintah Desa Cijulang dalam penyetoran PPh 22.

- (b) Tidak ditemukan permasalahan lainnya atas pemotongan dan penyetoran PPh 22.
- (4) Setelah seluruh transaksi diverifikasi, input kesimpulan pengujian dengan meng-klik tombol Kesimpulan.

#### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 16 Januari 2021

Dari 10 kegiatan yang diuji petik, terdapat kekurangan setor PPh 22 sebesar Rp681.818,00 untuk satu kegiatan yaitu belanja Bahan Baku/Material tanggal 6 September 2020.

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 22 Januari 2021.

#### Latihan 4.6.2 - Kesimpulan Uji Kewajiban Perpajakan

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Perpajakan KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan dan/atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas transaksi perpajakan desa.

Langkah Penginputan:

#### 1. Kesimpulan Utama

Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

Disusun oleh : Aldo Swastika Tanggal: 22 Januari 2021

Berdasarkan hasil verifikasi auditor, terdapat pajak yang masih kurang setor yaitu PPN kegiatan pengadaan mobil ambulance sebesar Rp90.909,00 dan PPh 22 belanja bahan baku/material sebesar Rp681.818,00.

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 2 Februari 2021.

#### 2. Temuan

1) Klik tombol "temuan" untuk menginput temuan.

2) Berdasarkan kesepakatan tim Pemeriksaan, dari hasil pengujian substantif atas transaksi perpajakan di Desa Cijulang dapat dirumuskan temuan sebagai berikut:

#### **Temuan Pertama**

Kode temuan	:	0202 (Pajak yang telah dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan)		
Uraian	:	kekurangan penyetoran PPN untuk kegiatan pengadaan mobil ambulance.		
Kriteria	:	PMK nomor 231 Tahun 2019		
Nilai	:	Rp90.909,00		
Penyebab				
Kode Penyebab	:	0501 (Pencatatan tidak diselenggarakan secara cermat)		
Uraian	:	Terdapat kesalahan penyetoran PPN.		
Akibat	:	Kerugian Negara		
Kode Saran	:	0102 (Penyetoran ke Kas Negara atas Pajak dan nonpajak)		
Uraian	:	Penyetoran kekurangan PPN sebesar Rp90.909,00.		
Tanggapan	:	Kepala Desa Cijulang sependapat dengan temuan tim pemeriksa dan akan menyetorkan kekurangan.		

#### **Temuan Kedua**

Kode temuan 0202 (Pajak yang telah dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan) Kekurangan penyetoran PPh 22 untuk kegiatan Uraian belanja barang/material Kriteria PMK nomor 231 Tahun 2019 Nilai Rp681.818,00. Penyebab 0501 (Pencatatan tidak diselenggarakan secara Kode Penyebab cermat) Bendahara tidak segera menyetorkan PPh 22. Uraian Akibat Kerugian Negara Kode Saran 0102 (Penyetoran ke Kas Negara atas Pajak dan nonpajak) Penyetoran kekurangan PPh 22 sebesar Uraian Rp681.818,00. sependapat Kepala Desa Cijulang dengan Tanggapan temuan tim pemeriksa dan akan menyetorkan kekurangan.

## 3. Permasalahan lainnya

Tidak terdapat permasalahan lainnya.

#### **PELATIHAN 4.7**

#### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PENGELOLAAN ASET DESA

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas pengelolaan aset desa pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

#### Penjelasan:

Pengujian substantif atas pengelolaan aset desa terdiri dari dua kertas kerja pendukung yaitu Kertas Kerja penambahan aset dan Kertas Kerja inventarisasi aset, serta kertas kerja utama.

#### Latihan 4.7.1 - Uji Subtantif Penambahan Aset

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian transaksi penambahan aset Desa Cijulang.

#### Langkah Kerja

Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci – Uji Substantif – Aset Desa – Tab
 KKD Penambahan Aset

#### • Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian atas transaksi penambahan aset yang berasal dari realisasi belanja modal desa.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Pada sub menu KKD Penambahan Aset klik Load untuk memunculkan data transaksi belanja modal.
  - 2) Pada masing-masing transaksi belanja modal, klik tanda "+" di sebelah kiri jenis belanja modal untuk mengisi rincian penambahan aset desa.
  - 3) Klik Tambah untuk mengisi penambahan aset. Berdasarkan hasil verifikasi auditor, daftar penambahan aset desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Cijulang adalah sebagai berikut:

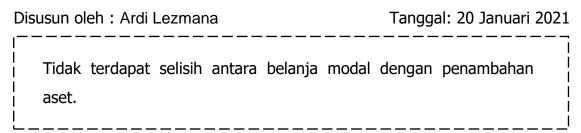
Tabel 4.12

Daftar Penambahan Aset Desa TA 2019 pada Desa Cijulang

No.	Jenis	Nama_Aset	Nilai Aset
1	5.3.2.	Smartphone (sapa warga)	16.900.000
2	5.3.3.	Mobil Ambulance	160.000.000
3	5.3.4.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	161.163.000
4	5.3.4.	Pembangunan Lapangan Serba Guna (SPB)	14.540.000
5	5.3.5.	Pembangungan TPT Jalan lembur Sawah	40.885.500
6	5.3.5.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	610.082.000
7	5.3.5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	300.841.000
8	5.3.8.	Pembangunan Sumur Bor Kp. Cibogo RT.022 RW.007	29.320.500
		JUMLAH	1.333.732.000

4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas penambahan aset desa.

#### **KESIMPULAN**



Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 23 Januari 2021.

## Latihan 4.7.2 - Uji Subtantif atas Inventarisasi Aset

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian substantif atas inventarisasi aset Desa Cijulang.

## Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Aset Desa Tab
   KKD Inventarisasi Aset
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian atas hasil inventarisasi aset desa.

- Langkah Penginputan:
  - 1) Pada sub menu KKD Inventarisasi Aset klik tombol Tambah untuk menginput hasil inventarisasi aset.
  - 2) Hasil inventarisasi aset desa oleh auditor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Inventarisasi Aset Desa oleh Auditor

No.	Nama Jenis	Tahun Perolehan	Nilai Aset	Keberadaan	Keterangan
1	Jalan Usaha Tani RT 03/05	2017	63.000.000	Ada	Kondisi Baik
2	Jalan Poros Desa 2 km	2018	132.000.000	Ada	Kondisi Baik
3	Kantor Desa	2015	156.000.000	Ada	Kondisi Baik
	JUMLAH		351.000.000		

3) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas inventarisasi aset desa

#### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Ardi Lezmana Tanggal: 20 Januari 2021

Tidak terdapat permasalahan dari hasil inventarisasi aset desa.

Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 23 Januari 2021.

Hasil cek fisik atas kondisi aset dapat diungkapkan didalam kolom keterangan.

## Latihan 4.7.3 – Kesimpulan Uji Subtantif Pengelolaan Aset Desa

Anda sebagai ketua tim akan merumuskan kesimpulan pada kertas kerja utama atas kertas kerja yang telah disusun oleh anggota tim anda.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Aset Desa KKU
- Penjelasan:

Program Kerja ini bertujuan untuk menuliskan kesimpulan utama dan temuan dan/atau permasalahan lainnya untuk pengujian substantif atas pengelolaan aset desa.

• Langkah Penginputan:

## 1. Kesimpulan Utama

Klik tombol Tambah untuk input Kesimpulan Utama

#### **KESIMPULAN**

Disusun oleh : Aldo Swastika	Tanggal: 23 Januari 2021
Tidak terdapat permasalahan terkait pen	gelolaan aset desa

Kesimpulan tersebut direviu oleh Mohammad Syukur pada 2 Februari 2021. Jika terdapat kapitalisasi aset pada tahun berjalan, informasi tersebut dapat dimasukan pada kolom kesimpulan.

#### 2. Temuan

Tidak terdapat temuan pada pengujian substantif ini.

#### 3. Permasalahan lainnya

Tidak terdapat permasalahan lainnya pada pengujian substantif ini.

#### **PELATIHAN 4.8**

#### PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN

Anda sebagai ketua tim akan menugaskan anggota tim anda untuk melakukan pengujian substantif atas pemanfaatan hasil kegiatan pada Desa Cijulang dengan menggunakan kertas kerja yang telah tersedia pada Aplikasi Siswaskeudes.

#### Penjelasan:

Pengujian substantif atas pengelolaan aset desa hanya terdiri dari satu kertas kerja yaitu Kertas Kerja pemanfaatan.

## Latihan 4.8.1 - Uji Subtantif atas Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Anda sebagai salah satu anggota tim diinstruksikan untuk melakukan pengujian atas pemanfaatan hasil kegiatan Desa Cijulang.

#### Langkah Kerja

- Sub Menu yang digunakan: Pemeriksaan Rinci Uji Substantif Pemanfaatan –
   Tab KK Pemanfaatan
- Penjelasan:

Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengujian atas pemanfaatan hasil kegiatan.

## • Langkah Penginputan:

- 1) Klik Load untuk melihat data kegiatan yang telah dilaksanakan di desa beserta uraian output kegiatannya.
- 2) Pilih kegiatan sampel yang akan diuji. Kegiatan yang diuji petik pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

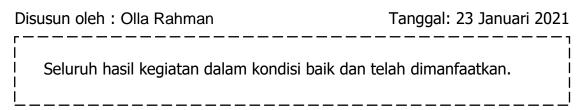
Tabel 4.14

Data Sampel Kegiatan untuk Uji Petik Pemanfaatannya

No.	Kd_Keg	Nama Paket	Anggaran	Realisasi	%	Pemanfaatan
1	02.02.04.	Pengadaan Ambulance	160.000.000	160.000.000	100	Sudah
2	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Tanjakan Cibuyung (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100	Sudah
3	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Turunan Cibuyung (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100	Sudah
4	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Tanjakan Cimadang (250 x 2 M)	75.520.000	75.520.000	100	Sudah
5	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Turunan Cimadang (350 x2 M)	103.574.000	103.574.000	100	Sudah
6	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Pasir Astana (150 x 2 M)	47.266.000	47.266.000	100	Sudah
7	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Cicadas (150 x 2 M)	47.266.000	47.266.000	100	Sudah
8	02.03.10.	Pengaspalan Jalan Pasir Laya (150 x 2 M)	47.266.000	47.266.000	100	Sudah
9	02.03.11.	Pengaspalan Jalan Kp. Cibogo RT.023 RW.007 (200 x 2 M)	60.519.017	60.519.000	100	Sudah

No.	Kd_Keg	Nama Paket	Anggaran	Realisasi	%	Pemanfaatan
10	02.03.11.	Pengaspalan Jalan Kp. Cicupak RT.036 RW.011 (200 x 2 M)	60.518.000	60.518.000	100	Sudah
11	02.03.11.	Pengaspalan Jalan Kp. Ciherang RT.039 RW.011 (450 x 2 M)	140.314.000	140.314.000	100	Dimanfaatkan
	JUMLAH		893.283.017	893.283.000	100	

- 3) Untuk menginput hasil pengujian, klik tombol Verifikasi untuk masing-masing kegiatan kemudian input kondisi, pemanfaatan, dan catatan atas output kegiatan. Atas pengujian kondisi dan pemanfaatan hasil kegiatan yang diuji petik tersebut, diperoleh data bahwa hasil kegiatan seluruhnya dalam kondisi baik dan telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuannya
- 4) Klik tombol Kesimpulan untuk menginput kesimpulan pengujian substantif atas penambahan aset desa.



Kesimpulan tersebut direviu oleh Aldo Swastika pada 2 Februari 2021. Hasil konfirmasi ke penerima program/kegiatan atau penerima manfaat diungkapkan dalam kolom cacatan auditor

5) Tidak ada temuan atau permasalahan lainnya pada pengujian subtantif ini

## **BAB V**

# PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

#### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami substansi laporan yang dihasilkan oleh aplikasi berdasarkan data-data yang sudah diinputkan sebelumnya.

Pada menu Pelaporan Hasil Pemeriksaan tidak ada input data, data yang telah diinputkan pada tahap sebelumnya akan ditampilkan pada menu pelaporan hasil pemeriksaan. Output pelaporan hasil pemeriksaan dari aplikasi Siswaskeudes bukan format baku, hanya menyajikan substansi sesuai data yang diinput, penggunaannya perlu disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku pada instansi APIP. Output pelaporan yang dihasilkan dari aplikasi yaitu:

#### 1. Rekapitulasi Kesimpulan Kertas Kerja

Rekapitulasi Kesimpulan Kertas Kerja merupakan notisi hasil pemeriksaan yang perlu disampaikan kepada obyek pemeriksaan untuk dimintakan tanggapan secara tertulis.

#### 2. Rekapitulasi Temuan

Menyajikan informasi temuan, kriteria, sebab, akibat, saran, tanggapan dan tindak lanjutnya.

#### 3. Rekapitulasi Permasalahan Lainnya

Menyajikan informasi permasalahan yang ditemui dan perlu mendapat perhatian obyek pemeriksaan tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai suatu temuan.

#### 4. Draft Laporan Hasil Pemeriksaan

Menyajikan draft mentah Laporan Hasil Pemeriksaan yang perlu disesuaikan dengan tata naskah dinas pada instansi APIP dan perlu disesuaikan dengan bahasa laporan yang baik.

## Langkah kerja:

- 1) Sub Menu yang digunakan: Pelaporan Hasil Pemeriksaan
- 2) Pilih nama desa yang tersedia
- 3) Pilih salah satu jenis pelaporan yang akan ditampilkan
- 4) Klik tombol Preview
- 5) Hasil laporan disimpan dengan nama file yang berbeda

# **TIM PENYUSUN MODUL**

	4 D T 111 C' '	LI MA CDCD OCIA CE A			
Pengarah	: 1. Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA,				
	CGCAE, Inspektur Jenderal Ke	_			
	2. Dadang Kurnia, Ak, MBA,CA				
	CGCAE, Deputi Kepala	BPKP Bidang Pengawasan			
	Penyelenggaraan Keuangan [	Daerah			
Penanggungjawab	: 1. Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRO	GP Inspektur III Inspektorat			
	Jenderal Kementerian Dalam	Negeri			
	2. Drs. Adil Hamonangan	Pangihutan, MM, Direktur			
	Pengawasan Akuntabilitas K	euangan, Pembangunan, dan			
	Tata Kelola Pemerintahan De	sa, BPKP			
Supervisor	: 1. Edy Suharto				
	2. Wiratmoko				
	3. Rolekson Simatupang				
	4. Ahmad Husin Tambunan				
	5. Irene Lindri Probosari				
	6. Frida Aryanti				
	7. Akhmad Basori				
	8. R. G. Megantoro				
Tim Kerja	:				
	1. Al Verdayanie	9. Norman Girsang			
	2. Abdul Sukur	10. Maradona Herman			
	3. Temmy Pratama	11. Agung Wirabuana			
	4. Fenny Ika Susanty	12. Valentinus Agus Triatmadi			
	5. Dewi Wahyuningsih	13. Budi Wahyudin			
	6. Fausiah Abdullah	14. Rusli Andriansyah			
	7. Erric Fadhli	15. Andi Agung Febrianto			
	8. Hanna Permata Setia Astuti	16. Rio Firman			